



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IV DPR RI
DENGAN
ESELON I KEMENTERIAN PERTANIAN RI**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- : 10 (Sepuluh)
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 6 September 2022
Waktu : Pukul 10.20 s.d. 18.40 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI
Gedung Nusantara I (KK-IV)
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDI P)
Acara : Membahas:
1. Progres evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022;
2. Progres evaluasi penyaluran bantuan pemerintah dan kegiatan bimbingan teknis Tahun 2022;
3. RKA/KL Tahun 2023;
4. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi.
- Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kepala Bagian Sekretariat Komisi IV DPR RI)
- Hadir : A. Anggota Komisi IV DPR RI:
47 dari 54 orang Anggota dengan rincian:
1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
10 dari 11 orang Anggota
1) Sudin, S.E.,/Ketua Komisi IV DPR RI
2) Riezky Aprilia, S.H., M.H.
3) H. Sunarna, S.E., M.Hum.
4) Ir. Mindo Sianipar - Virtual
5) Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.
6) Drs. I Made Urip, M.Si. - Virtual
7) Dr. H. Sutrisno, S.E., M.B.A.
8) Vita Ervina, S.E., M.B.A.
9) Maria Lestari, S.Pd.
10) Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S. - Virtual
2. Fraksi Partai Golongan Karya
7 dari 8 orang Anggota
1) H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M.

- 2) Firman Soebayo, S.E., M.H. - Virtual
 - 3) Ir. H. Hanan A. Rozak, M.S. - Virtual
 - 4) Ir. Panggah Susanto, M.M. - Virtual
 - 5) Alien Mus
 - 6) Teti Rohatiningih, S.Sos.
 - 7) Ravindra Airlangga, M.S.
3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
6 dari 7 orang Anggota
 - 1) G. Budisatrio Djiwandono/Wakil Ketua Komisi IV DPR RI - Virtual
 - 2) Ir. H. T. A. Khalid, M.M.
 - 3) Ir. Endro Hermono, M.B.A.
 - 4) Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.Sc.
 - 5) Ir. Dwita Ria Gunadi
 - 6) Dr. Azikin Solthan, M.Si.
 4. Fraksi Partai Nasional Demokrat
5 dari 6 orang Anggota
 - 1) Rusdi Masse Mappasessu/Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
 - 2) H. Sulaeman L. Hamzah
 - 3) Ir. Abdullah Tuasikal
 - 4) Julie Sutrisno - Virtual
 - 5) Yessy Melania, S.E. - Virtual
 5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
5 dari 6 orang Anggota
 - 1) Anggia Erma Rini, M.K.M./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
 - 2) Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A. -Virtual
 - 3) Daniel Johan, S.E. - Virtual
 - 4) Drs. H. Ibnu Multazam
 - 5) Edward Tanur, S.H.
 6. Fraksi Partai Demokrat
5 dari 5 orang Anggota
 - 1) DR. Suhardi Duka, M.M.
 - 2) Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
 - 3) Hj. Nur'aeni, S.Sos., M.Si.
 - 4) Muhammad Dhevy Bijak Pawindu
 - 5) Bambang Purwanto, S.ST., M.H.
 7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
4 dari 5 orang Anggota
 - 1) drh. H. Slamet - Virtual
 - 2) Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., M.M.
 - 3) Prof. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
 - 4) H. Johan Rosihan, S.T.
 8. Fraksi Partai Amanat Nasional
3 dari 4 orang Anggota

- 1) H. Muhammad Syafrudin, S.T., M.M.
- 2) Haerudin, S.Ag., M.H.
- 3) Fachry Pahlevi Kanggoasa, S.E. - Virtual

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
2 dari 2 orang Anggota
 - 1) Ema Umriyatul Chusnah - Virtual
 - 2) K.H. Asep A. Maoshul Affandy, M.Pd.I.

B. Pemerintah

1. Sekretaris Jenderal (Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc.);
2. Inspektur Jenderal (Dr. Jan Samuel Maringka, S.H., M.H.);
3. Direktur Jenderal Tanaman Pangan (Dr. Ir. Suwandi, M.Si.);
4. Direktur Jenderal Perkebunan (Andi Nur Alam Syah, S.T.P., M.T.);
5. Direktur Jenderal Hortikultura (Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc.);
6. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc.);
7. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D.);
8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si.);
9. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (Prof. (R) Dr. Ir. Dedi Nursyamsi M.Agr.);
10. Kepala Badan Karantina Pertanian (Ir. Bambang, M.M.);
11. Direktur Utama Perum BULOG (Budi Waseso) beserta jajaran;
12. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), (Achmad Bakir Pasaman) beserta jajaran; dan
13. Kuasa Direktur Utama/Direktur Supply Chain Management dan Teknologi Informasi PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID FOOD (Adhi Cahyono Nugroho).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat Anggota Komisi IV,

Yang terhormat Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Persero,
Yang terhormat Direktur Utama Rajawali Nusantara Indonesia atau ID Food,

Dalam hal ini, ini saya ingatkan ini lain kali ini untuk kedua kali ini ID Food enggak datang ya. Ini untuk kedua kali izinnnya.

Yang terhormat Direktur Utama Perum Bulog,
Hadirin yang kami hormati,

Mengawali rapat hari ini, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya dapat mengadakan rapat dengar pendapat ini dalam keadaan sehat walafiat.

Sesuai dengan jadwal acara rapat masa persidangan tahun sidang 2022-2023 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Bamus tanggal 23 Juni 2022, keputusan Rapat Internal Komisi IV tanggal 18 Agustus 2022, pada hari ini 6 September, Komisi IV menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dengan pejabat Eselon I Kementerian Pertanian dalam rangka membahas:

1. Progres evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022;
2. Progres evaluasi penyaluran bantuan pemerintah dalam kegiatan bimbingan teknis tahun 2022;
3. RKA/KL Tahun 2023 serta program yang akan didanai oleh DAK.

Ini perlu diketahui oleh pihak Kementerian Pertanian, teman-teman Anggota Komisi IV banyak yang komplain karena di wilayahnya yang dirasakan harus mendapatkan dana DAK tetapi tidak mendapatkan dana DAK.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 peraturan tentang Tata Tertib, rapat dengar pendapat ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.20 WIB)

Rapat dengar pendapat ini kami mulai pada pukul 10.50 WIB akan diakhiri pada pukul 14.00 WIB, apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 Peraturan tentang Tata Tertib atau atas kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar ketua rapat;
2. Penjelasan pejabat Eselon I;
3. Tanggapan Komisi IV;
4. Jawaban pejabat Eselon I;
5. Kesimpulan rapat;
6. Penutup.

Apakah acara dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Komisi IV sangat menaruh perhatian besar terhadap swasembada pangan, sehingga setiap kebijakan Pemerintah yang bertujuan untuk mencapai swasembada pangan, Komisi IV akan mendukung penuh. Namun, swasembada yang diinginkan adalah yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat bukan sekedar tabel atau angka.

Jika kita ingat kembali kenaikan harga beras berapa waktu yang lalu menunjukkan produksi belum terpenuhi secara utuh. Hal yang sama juga berlaku pada komoditas seperti cabai, bawang merah, telur, daging, minyak goreng. Oleh karena itu, Saudara Sekretaris Jenderal beserta jajarannya harus mampu merumuskan kebijakan-kebijakan pangan yang implementatif dan berorientasi pada peningkatan produksi apalagi tahun 2023 adalah tahun politik. Program Kementerian Pertanian yang disusun harus cermat, tepat sasaran dan berguna. Target strategisnya adalah peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.

Kementerian Pertanian juga harus menyikapi dengan bijak kenaikan harga BBM dan dampak yang akan muncul serta mengantisipasi potensi kelangkaan bahan bakar di pedesaan. Saat ini saja, saat ini saja, apabila petani ingin membeli BBM mengalami kesulitan. Kalau bawa dirigen sama pemilik SPBU tidak diberikan. Seandainya diberikan ada aparat hukum yang akan mengawasi. Apa mungkin, kalau satu kecamatan ada *hand tractor* 100, *hand tractor*-nya dibawa ke Stasiun SPBU, kan enggak mungkin.

Mengacu pada rapat kegiatan tanggal 31 Agustus 2022 yang lalu, Komisi IV meminta Kementerian Pertanian untuk menindaklanjuti saran masukan Anggota Komisi IV terutama terkait dengan program kegiatan bantuan Pemerintah pada tahun 2023, khususnya kegiatan yang berdampak langsung pada peningkatan produksi kesejahteraan petani. Untuk itu, Komisi IV meminta adanya penjabaran alokasi kegiatan strategis per kabupaten bersama-sama melakukan pendalaman terhadap program dan kegiatan tahun 2023. Komisi IV juga meminta untuk melakukan evaluasi pelaksanaan penyerapan anggaran kegiatan tahun 2022, serta akan melakukan refocusing apabila tidak berjalan dan kegiatan realokasi anggaran untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan target, apalagi Kementerian Pertanian telah mendapatkan tambahan melalui pemanfaatan ABT serta pemanfaatan anggaran PEN yang membuka blokir *automatic adjustment* lebih lanjut. Untuk anggaran yang tidak terserap, sebaiknya dialihkan kepada program bantuan Pemerintah atau bansos.

Kemudian Saudara Sekjen sebelum memaparkan lebih lanjut tentang Rancangan Anggaran Kegiatan Tahun 2023 agar memaparkan terlebih dahulu mengenai Pagu Indikatif Alokasi Khusus DAK Kementerian Pertanian Tahun 2023 beserta kegiatan per kabupatennya.

Tolong hasil Raker yang terakhir. Naik lagi. Naik lagi ke atasin terus, terus, terus. Naik lagi nomor 5. Ini nomor 5, saya... jangan hanya membuat kesimpulan rapat tapi kalau tidak dijalankan ya nanti kita lihat saja kita evaluasinya bagaimana.

Kemudian juga masalah THL-TBPP dengan mempertimbangkan masa pengabdian. Setuju? Komisi IV meminta Pertanian untuk meningkatkan produksi jagung nasional untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, penyediaan pakan ternak dan kebutuhan pangan lainnya.

Tadi saya tanya, ada enggak penyediaan alat tanam jagung yang seperti digunakan oleh Presiden Republik Indonesia waktu menanam di NTT? Enggak ada. Jadi sudahlah kalau bilang produksi jagung meningkat kayaknya “jauh panggang dari api”, *wassalam*. Alat itu berapa sih harganya? Siapa yang bisa jawab, kalau enggak salah enggak sampai sejuta. Berapa? Harga 1,5 juta itu bisa berapa kali efektifnya, ya kan itu kan alat yang didorong itu loh bisa masuk 2 butir, 1 butir 2 butir bibit kan malah kalau satu kelompok itu satu kawasannya besar misalnya di atas 100 hektar, sekarang kan sudah ada peralatan untuk menanam jagung yang ditarik pakai traktor roda empat ya kan. Ada bibitnya, ada ada alat lubang, masuk bibit, masuk pupuk, tutup lagi. Sudah ada alat itu saya lihat waktu itu di *Youtube*. Saya yakin di Indonesia juga ada, begitu loh.

Nomor 8, *nah* ini untuk melihat melakukan *refocusing* tapi sampai hari ini dari bahan yang ditampilkan belum ada. Kemudian kalau enggak salah, saya pernah meminta data mengenai per kabupaten yang kena PMK, sampai hari ini pun belum ada. Belum ada atau tidak ada ya. Kemudian saya minta dijawab langsung sampai hari ini, sampai hari ini berapa yang sudah divaksin.

Jawab langsung.

DIRJEN PKH:

Yang sudah divaksin per hari ini berdasarkan data yang diinput oleh petugas lapangan adalah 2.091.971, Pak.

KETUA RAPAT:

91.000?

DIRJEN PKH:

2.091.971.

KETUA RAPAT:

2 juta?

DIRJEN PKH:

2.091.971.

KETUA RAPAT:

Kok beda sama Satgas punya dia punya info?

DIRJEN PKH:

Ini 4 September, *part 2* karena data kan kita masukkan ke sekretariat tanggal itu sebelumnya.

KETUA RAPAT:

Tanggal 3 September, Satgas mengatakan 1,97 juta.

DIRJEN PKH:

Ini langsung kami print, Pak Ketua, dari sistem.

KETUA RAPAT:

Anda sistem Anda, kalau saya sistemnya dari Satgas karena saya juga kurang percaya sama Anda, makanya saya minta data dari Satgas.

DIRJEN PKH:

Data sekarang satu, Pak Ketua, namanya Siaga PMK, jadi Satgas juga pakai itu, Pak.

KETUA RAPAT:

Ya ini nyatanya saya dapat infonya. Saya kan selalu tiap hari kan komunikasi 1,97 juta hewan ternak yang telah disuntik vaksin PMK.

DIRJEN PKH:

Bisa dibukakan di sini. Bukakan Puskomnya, langsung kita buka.

KETUA RAPAT:

Nah, Anda oke itu nanti dilanjutkan. Yang saya minta data sudah ada belum?

DIRJEN PKH:

Data apa, Pak Ketua?

KETUA RAPAT:

Sekretariat masih ingat gak saya minta data apa? Sudah ada.

F-P.GOLKAR (ALIEN MUS):

Pimpinan, izin.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-P.GOLKAR (ALIEN MUS):

Saya ingin bahwa rapat kita ini saya juga ingin data ini yang disampaikan oleh Pak Dirjen tapi alangkah baiknya Ketua, kita buka rapat ini dan disampaikan seluruh paparan dari Eselon I, sehingga kita lebih fokus kepada beberapa Eselon I yang sudah masuk di bulan 9 ini untuk penyerapan dan sebagainya dan kita akan berbicara tentang 2023 dan fokus kepada PMK Pimpinan.

Mohon maaf, itu saja yang saya sampaikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya bingung ini mau minta data saja kok susah. Padahal, sudah dua bulan lalu saya bilang, kalau kalian enggak punya data, udah mengarang bebas saja, enggak apa-apa kok. Kami ini kan enggak ada yang tahu juga enggak mungkin mengecek per 1-1-1-1 ya. Ini saya ingatkan ini, cuman kalau sampai ketahuan sama saya, ya saya *wassalam* begitu loh. Tampaknya Pak Dirjen ini enggak menguasai permasalahan, sebentar-sebentar memanggil Sesdir, sebentar-sebentar memanggil Direktur.

DIRJEN PKH:

Izin, Pak Ketua.

Informasi sudah disampaikan ke Sekretariat Komisi, data yang diminta.

KETUA RAPAT:

Data ini valid ga? Data ini didapatkan dari mana?

DIRJEN PKH:

Ini dari web PMK, Siaga PMK, Pak.

KETUA RAPAT:

Siaga PMK adanya di mana ujung tombaknya?

DIRJEN PKH:

Ini data bersama Pak antara

KETUA RAPAT:

Bukan, saya tanya begini dengar dulu. Yang saya tanya dijawab dulu. Data ini ujung tombaknya dari mana? Dari penyuluh peternakan kah, penyuluh pertanian atau dari UPT atau dari dinas kabupaten. Kan sudah saya sudah bilang, kan sudah saya bilang, kan sudah saya bilang, tolong kita sama-sama jujur untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini, ya tolong. Sekali lagi saya bicara tolong, saya juga sabar ada batasnya Bos, ya itu saja.

Jadi kepada Sekjen, Eselon I beserta mitra rapat ini akan kami skors pada pukul 13.30 WIB. Selesai kami Paripurna, kami kembali lagi kita lanjutkan. Jadi nanti dilanjutkan apa yang menjadi topik-topik tadi harus dijelaskan karena hari ini adalah akan dirayakan HUT DPR RI, begitu ya. Jadi sampai 13.30 WIB kita *break* mungkin nanti sampai jam 14.00 WIB kita buka kembali, enggak apa-apa sampai pagi juga kalau saya mah.

Demikian pengantar kami sampaikan.

Selanjutnya kami persilakan Saudara Sekjen, para pejabat Eselon I Kementerian Pertanian untuk menyampaikan penjelasan secara rinci dan terukur. Silakan.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Terima kasih Pak Ketua.

Bapak/Ibu yang kami hormati,
Para Pimpinan dan juga Anggota Komisi IV DPR RI,
Para mitra BUMN, mohon maaf tidak bisa sebut satu, satu,
Para Dirjen, Kepala Badan, dan seluruh jajaran Kementan yang kami muliakan,

Pertama, kami sampaikan terima kasih atas undangan ini. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal secara umum nanti para pejabat Eselon I yang terkait akan secara rinci menyampaikan masing-masing.

Lanjut halaman 4.

Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota yang kami muliakan,

Kami laporkan bahwa realisasi anggaran Kementerian Pertanian per 2 September, per 2 September berdasarkan realisasi plus *outstanding contract* totalnya 48,51% dengan rincian sebagai berikut: Sekretariat Jenderal 56,8%; Inspektorat Jenderal 64,05%; Dirjen Tanaman Pangan 58,67%; Direktorat Jenderal Hortikultura 50,65%; Dirjen Perkebunan 59,25%; Dirjen PKH 28,31%; Dirjen PSP 55,56%; Badan Litbang 48,16%; PPSDMP 62,59%; dan Badan Karantina 61,65%.

Dari realisasi tersebut Bapak/Ibu sekalian, kami mencoba juga untuk me apa menskenariokan realisasi berdasarkan beberapa pertimbangan. Lanjut. Jika tanpa *automatic adjustment* anggaran BRIN dan juga anggaran Bapanas

(Badan Pangan Nasional) realisasi kita mencapai 51,63% dengan rincian: Sekretariat Jenderal 64,87%; Inspektorat Jenderal 64,05%; Dirjen Tanaman Pangan 62,08%; Dirjen Hortikultura 51,09%; Dirjen Perkebunan 66,03%; PKH 28,32%; PSP 57,79%; Badan Litbang 60,76%; PSDMP 65,43%; dan Badan Karantina 64,24%.

Adapun capaian beberapa komoditas utama produksi komoditas utama, lanjut, untuk padi sudah mencapai 90,75% dari target 54,89 juta ton, terealisasi 49,82 juta ton. Jagung 90,53%, bawang merah 65%, cabai 58,08%, kopi 89,11%, tebu 63,18%, karet 66,85%, kelapa 60,2%, daging sapi 81,67%, domba kambing 58,33%, daging ayam ras pedaging 62,18%, telur 65,65%.

Adapun progres capaian output utama

KETUA RAPAT:

Sebentar, sebentar Pak Sekjen.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Siap, Bapak.

KETUA RAPAT:

Balik lagi tadi.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Kembali ya.

KETUA RAPAT:

Terutama masalah karet. Hari ini tanggal 6 September. Ingat 10 tahun lalu, 10 tahun akan datang Indonesia jadi importir karet. Penyusutan penebangan pohon karet diganti dengan pohon singkong, pohon lain-lain. Setiap tahun berapa persen itu yang pertama, karena apa? Pertama, harga karet jatuh, yang kedua tidak ada kepedulian Pemerintah terhadap petani karet.

Kemudian daging itu 0,36 juta, 0,36 itu hitungannya bagaimana sih nol koma kenapa enggak pakai 360.000 ton begitu supaya kelihatan *wah* ya atau bagaimana. Saya juga bingung kadang-kadang sama Kementan 0,3, terus daging domba kambing 0,06 juta ton. Jadi jangan ditampilkan jutanya ini *loh* maka saya enggak habis pikir *kok demen* banget pakai kata-kata juta ini. 0,36 juta ton. Kebutuhan rakyat hal daging sapi berapa kira-kira per tahun, Sekjen per tahun?

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Untuk tahun 2022

KETUA RAPAT:

Jangan 2022 lah kan belum habis, 2021 dulu.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Itu sekitar 711.885.

KETUA RAPAT:

Kebutuhannya? Kebutuhan?

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Ya, kebutuhan, Pak.

KETUA RAPAT:

Kebutuhan berarti keseluruhan *toh* termasuk impor daging kerbau kan?

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Iya, keseluruhan kebutuhan daging nasional sumbernya ada dalam negeri ada impor.

KETUA RAPAT:

Kira-kira perkapita berapa kilo setahun?

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Kita pakai perkapitanya, Pak, itu 2,59 Kg.

KETUA RAPAT:

Dua koma?

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

59.

KETUA RAPAT:

Oke, lanjutkan Sekjen.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Terima kasih, Pak.

Kami lanjutkan untuk progres capaian output utama Kementerian Pertanian untuk padi ini satuannya adalah hektar. Padi 49,09% dari target 1,02 juta hektar, terealisasi 498.895 hektar. Demikian juga dengan jagung 55,61%, bawang merah 51,23%, aneka cabai 41,6%, rehab jaringan irigasi 79,34%, kredit usaha tani 82,9%, irigasi perpipaan 52%, irigasi perpompaan 49%, alat mesin pertanian 54,18%, embung pertanian 70,5%, optimalisasi reproduksi 85,32%, produksi benih ternak unggul 67,45% dan produksi bibit ternak unggul 56,85%. Demikian beberapa perkembangan anggaran dan, dan fisiknya.

Bapak/Ibu sekalian,
Para Pimpinan dan Anggota yang kami hormati,

Izinkan, kami melanjutkan berkait dengan penyaluran bantuan Pemerintah dan Bimtek di lingkungan Kementerian Pertanian. Nanti, mohon para Eselon I mendetailkan di masing-masing kegiatannya. Kami laporkan untuk penyaluran bantuan Pemerintah dari pagu 5,83 triliun, terealisasi 34,20% atau 1,99 triliun. Berkait dengan pelaksanaan Bimtek dari total 1 1.172 paket terealisasi 759 paket atau 70,94%. Nanti, mohon Eselon I merinci lebih detail lagi kegiatan Bimtek topik kegiatan dan juga perkembangannya di masing-masing Eselon I.

Baik, lanjut.

Berkait dengan program 2023, kami laporkan Bapak/Ibu sekalian, seperti halnya sudah disampaikan di dalam rapat kerja dengan Bapak Menteri Pertanian bahwa Program Kementerian Pertanian di 2023 ada empat fokus kepada 2023. Program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas, yang kedua program nilai tambah dan daya saing industri, ketiga adalah program pendidikan dan pelatihan vokasi dan keempat program dukungan manajemen.

Keempat program tersebut untuk mengampu prioritas nasional yang pertama yaitu memperkuat ketahanan ekonomi dan juga pertumbuhan berkualitas serta berkeadilan yang ini meng-cover dua program prioritas, yaitu program prioritas 3 adalah peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan. Kemudian program prioritas 6 peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi.

Lanjut.

Dari program tersebut, kami telisik kegiatan utamanya kami ...*(suara tidak jelas)* kegiatan utamanya: tanaman pangan hortikultura perkebunan peternakan sebagai berikut dan juga beberapa Dirjen pendukungnya.

Untuk Tanaman Pangan, optimalisasi peningkatan indeks pertanaman; kemudian pengembangan padi biofortifikasi; ketiga adalah pengembangan kawasan jagung untuk ekspor; keempat adalah pengembangan kedelai dan *integrated farming*.

Hortikultura, pengembangan Kampung Hortikultura; pengembangan agroindustri hortikultura di beberapa lokasi Temanggung, Wonosobo, Garut, Gresik dan Bantul; kemudian pengembangan produksi benih hortikultura; pengembangan UMKM hortikultura; dan Pekarangan Pangan Lestari atau P2L.

Untuk Perkebunan, pertama adalah korporasi perkebunan rakyat rumah tangga; produksi benih 15 juta batang dan pengembangan kawasan kopi kelapa, jambu mete, kakao, dan pinang; ketiga adalah penguatan hilirisasi pinang; pengembangan sagu berbasis korporasi petani; percepatan swasembada gula konsumsi; dan pengembangan gula non tebu di antaranya meliputi gula stevia, aren, dan kelapa.

Untuk Dirjen Peternakan, pengembangan desa korporasi sapi; kemudian pengembangan korporasi kambing dan/atau domba; pengembangan sarang burung walet; pengembangan sapi potong berbasis padang penggembalaan dan integrasi sapi-sawit; dan yang kelima optimalisasi reproduksi dan penanganan PMK.

Untuk PSP, pengembangan taksi alat mesin pertanian; optimalisasi lahan baik intensifikasi maupun ekstensifikasi lahan; ketiga adalah program irigasi pertanian sebagai adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; pembiayaan pertanian melalui kredit usaha rakyat; kemudian pengelolaan pupuk bersubsidi.

Untuk Benih dan Instrumen lainnya ada beberapa kegiatan, pengembangan logistik perbenihan; kemudian pelayanan jasa alat mesin pertanian alat mesin pertanian produksi dalam negeri; pelayanan peningkatan mutu produk pertanian; dan adaptasi mitigasi perubahan iklim.

Untuk Sumber Daya Manusia Pertanian, kegiatannya beberapa di antaranya adalah penguatan kinerja penyuluh pertanian di daerah; peningkatan peran pendidikan dan pelatihan vokasi; penumbuhan kelompok usaha, kelompok usaha bersama petani muda; dan pengembangan wirausaha muda pertanian.

Untuk Perkarantina, yang pertama adalah penguatan sistem pencegahan masuk dan tersebarnya OPTK dan HPHK; penguatan tindakan karantina mendukung gerakan tiga kali ekspor; penguatan wilayah perbatasan; penguatan pengawasan dan penindakan; penguatan teknologi informasi dan penguatan SDM karantina.

Dari beberapa program tadi, kami 2023 menargetkan beberapa komoditas sebagai berikut: untuk padi di 2023, kami targetkan 54,5 juta ton, jagung 23,05 juta ton dengan kadar air 27%, kedelai 0,59 juta ton atau 590.000 ton, cabai 2,93 juta ton, bawang merah 1,71 juta ton, bawang putih 45,45 ribu ton. Kemudian kopi 810.000 ton atau 0,81 juta ton, kakao 780.000 ton, tebu 37,15 juta ton, kelapa 2,99 juta ton, daging sapi 465,15 ribu ton.

Bapak/Ibu sekalian yang kami muliakan,

Berkait dengan anggaran halaman 15, pagu Kementerian Pertanian di 2023 adalah sebagai berikut: total pagu untuk pagu, pagu anggaran atau pagu sementara itu Rp15,42 triliun dengan rincian sebagai berikut: Sekretariat Jenderal 1,47 triliun; Inspektorat Jenderal 137 miliar; Dirjen Tanaman Pangan 3,096 triliun; Dirjen Hortikultura 1,03 triliun; Dirjen Perkebunan Rp1,14 triliun; Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp2,89 triliun; Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Rp2,7 triliun; Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Rp814,5 miliar; Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Rp946,04 miliar; kemudian Badan Karantina Rp1,09 triliun. Kami laporkan di dalam.. untuk sementara di pagu ini masih melekat dananya Badan Pangan Nasional Rp103,5 miliar.

Kami lanjutkan berkait dengan dana DAK. Kami laporkan Bapak/Ibu sekalian, para Pimpinan dan Anggota dan Bapak/Ibu sekalian. Tahun Anggaran 2023, dana alokasi khusus di Kementerian Pertanian teralokasi Rp2,6 triliun terdiri dari DAK fisik Rp2,3 triliun, DAK non fisik Rp300 miliar. Dari DAK fisik Rp2,3 triliun, terdiri dari tematik untuk pengembangan *food estate* Rp650 miliar dan tematik pengawasan kawasan sentra produksi pangan Rp1,65 triliun.

Beberapa kebijakan dan pagu indikatif dan DAK fisik tahun 2023 sebagai berikut. Tadi di rincian sudah kami sampaikan, prinsipnya adalah bahwa mekanisme di dalam usulan DAK fisik bidang pertanian melalui sistem yang disebut dengan Krisna Bappenas dan itu terdiri dari usulan dari pemerintah daerah dan aspirasi dari DPR RI. Ini beberapa di antaranya adalah untuk kegiatan-kegiatan fisik, DAK fisik itu penguatan kawasan produksi pangan berbasis korporasi, terintegrasi dari hulu hingga hilir dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi nasional.

KETUA RAPAT:

Sekjen.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Siap.

KETUA RAPAT:

Itu kan ada mekanisme usulan DAK fisik bidang pertanian melalui Krisna, ya kan. Di sini usulan Pemda aspirasi DPR RI dalam hal ini Anggota Banggar. Jadi Bapak-bapak ini Anggota Komisi IV enggak ada enggak bisa memasukkan itu, ... ya. Jadi percuma ditampilkan dibahas juga enggak ada gunanya. Jadi kita yang membahas, mereka mitra kita, terus bagaimana? Pak Andi kan dulu di Banggar coba dijawab.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):

Ketua, di Banggar juga enggak jelas karena ini memang masalah di Bappenas dan apa Menteri Keuangan sebenarnya masalah ini kan masalah DAK ini. Jadi saya kira kita ya memberikan masukan tapi sebatas masukan, Ketua.

Terima kasih. Bukan Anggota Banggar sekarang, Ketua.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Baik.

Baik izin Bapak kami lanjutkan.

Dengan rancangan menu dan DAK fisik tahun 2023, yang pertama berkaitan dengan tematik untuk *food estate* untuk DAK kabupaten kota itu ada beberapa menu ada tujuh menu. Pertama adalah pembangunan rehabilitasi irigasi pertanian yang terdiri dari rehabilitasi jaringan irigasi tersier, jaringan irigasi air tanah dangkal, irigasi air tanah dalam, embung dan asmat irigasi. Kemudian yang kedua pembangunan jalan pertanian, terdiri dari jalan usaha tani dan jalan produksi. Menu yang ketiga renovasi Balai Penyuluh Pertanian dan sarana pendukungnya. Kemudian yang keempat adalah renovasi Pusat Kesehatan Hewan dan sarana pendukungnya. Pembangunan Unit Pengolahan Pakan dan *Smart* Kandang Ternak, serta enam, sarana dan prasarana pertanian di dalamnya adalah untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan unit pengolahan hasil komoditas, bangunan *rice milling* unit, bangunan *dryer* padi berkapasitas 10 ton, sarana panen dan sarana pasca panen dan menu ketujuh adalah pembangunan *green house* untuk pengembangan hortikultura di luar musim dan instalasi pertanian regeneratif.

Untuk beberapa yang berkaitan dengan KSPP DAK...

KETUA RAPAT:

Sekjen, saya mau tanya. Ini DAK kabupaten/kota usulan siapa? Nilainya kan cukup gede ini 300 lebih, berapa nilainya untuk *food estate*? Untuk *food estate*.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Untuk *food estate* 650 miliar, Bapak.

KETUA RAPAT:

Untuk *food estate*?

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Ya, untuk kawasan sentra produksi baru 1,6 triliun.

KETUA RAPAT:

Oh seingat saya, Anggota Komisi IV kan pernah memprotes masalah *food estate*. Kalau *food estate* itu programnya Bappenas minta duit sama Bappenas. Ini harus kita telaah lagi ini, ya kan. Contoh di Humbang Dirjen Hortikultura sukses enggak? Jawab. Yang kata konon... konon... konon katanya 30.000 hektar, sukses enggak yang sekarang masih 200, 200 hektar.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Masih 215 hektar yang kami garap, Pak.

KETUA RAPAT:

Sudah tiga tahun. Makanya saya juga bingung kok tiba-tiba DAK untuk fisik masuk lagi. Wandu, Kalteng bagaimana, PSP Kalteng bagaimana? Dari sekian ratus ribu bagaimana? jujur ini jawab ini.

DIRJEN PSP KEMENTERIAN PERTANIAN:

Siap, Pak.

Itu yang kalau Kalteng itu 2020, kita intensifikasi sekitar 30.000, Pak, 29 koma sekian itu intensifikasi. Terus yang di 2021, kita intensifikasi sekitar 14.000, lulus ekstensifikasi 16 sama 643. Di 2022-nya, Pak, itu hanya 2.923 kira-kira begitu, Pak. Di 2023 tidak ada lagi untuk *food estate*.

Terima kasih, Pak Ketua.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Pimpinan, Pimpinan, Pimpinan. Pak Suhardi.

KETUA RAPAT:

Sebentar, sebentar saya jawab. Saya ngomong dulu.

Kira-kira di *food estate* Kalimantan Tengah itu 1 hektar dapat enggak 7 ton?

DIRJEN PSP KEMENTERIAN PERTANIAN:

Belum, Pak, tujuh ton, belum.

KETUA RAPAT:

Lima ton?

DIRJEN PSP KEMENTERIAN PERTANIAN:

Tidak, kita 4,5, Pak, paling tinggi, Pak.

KETUA RAPAT:

Dijamin 4,5?

DIRJEN PSP KEMENTERIAN PERTANIAN:

Iya. Ini ada yang 4,5, Pak, masih ada juga yang tiga koma, Pak. Jadi ada yang di 4,5 itu yang sudah bagus yang kalau diintensifikasi....

KETUA RAPAT:

Ada yang dua tahun enggak? Ya enggak jawab saja, kita kita saya bukan menyalahkan Anda. Kita cari solusi ya. Ada enggak yang dua tahun satu hektar? Jawab dong pakai *speaker*.

DIRJEN PSP KEMENTERIAN PERTANIAN:

Pasti ada itu, Pak, karena itu kan paling baru, Pak. Kalau dia bukan baru itu bisa terjadi, Pak.

KETUA RAPAT:

Ya, sekarang bagaimana kalau satu hektar membutuhkan dolomit sekian ton mau berapa puluh kapal untuk mengurangi tingkat keasamannya.

Ya, Pak Suhardi Duka, silakan singkat sambil nanti dilanjutkan lagi.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Menu DAK ini, Pak, itu dibuat oleh kementerian jadi menunya tapi alokasinya dibuat oleh Bappenas. Olehnya itu, kita minta supaya menu DAK ini lebih tidak terlalu spesifik. Ini kan masuk lagi *food estate* di sini. Jadi hampir seluruh daerah yang tidak memiliki *food estate* itu tidak mendapatkan dana DAK dari alokasi Bappenas karena menunya memang menu *food estate*. Inilah masalahnya, Pak Ketua. Jadi saya pikir menu DAK ini perlu diperbaiki, jangan terlalu banyak ke hal-hal yang spesifik, katakanlah seperti *food estate* yang belum jelas dia punya tingkat keberhasilan di Indonesia. Ini yang menyebabkan sehingga tidak terjadi keadilan penyebaran DAK di Indonesia.

Terima kasih, Pimpinan.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.)

Pak Ketua,

Jadi Komisi menurut saya Komisi IV harus ada sikap soal *food estate* ini, Pak Ketua. Kemarin di Kehutanan pas di kesimpulan ya, saya juga

menyampaikan itu cuma kemarin oh ini dari Bappenas, akhirnya enggak jadi kita persoalkan di dalam kesimpulan. *Nah*, kalau saran saya kita harus punya sikap dan buat kesimpulan bahwa *food estate* ini tidak boleh dilanjutkan begitu ya seperti disampaikan Pak Suhardi duka tadi itu. *food estate* ini tidak merata *kok* hanya ada beberapa tempat itu pun tidak berhasil tapi karena menunya adalah apa *food estate* akhirnya cuma ke situ, jadi tidak ada keadilan anggaran nanti soal ini, Pak Ketua, dengan hasil yang tidak jelas

KETUA RAPAT:

Apalagi tadi kan cuman khusus ke sana kan, kita enggak ada aspirasi kan.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.)

Betul, enggak ada dari kita.

KETUA RAPAT:

Cukup ? Pak Slamet? Setelah ini biar kita lanjutkan.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Baik.

Terima kasih, Pimpinan, terima kasih waktunya.

Terkait dengan *food estate* makanya saya mengingatkan kembali kemarin waktu Raker, saya sekedar untuk mendengarkan saja di kesimpulan mohon maaf waktu itu, Pak Ketua, tidak hadir, memberi catatan kita tidak menerima setelah mendengarkan enggak menerima itu.

Pak Ketua dan Anggota yang lain,

Ini resmi dari BPK ya. Di sini disampaikan temuannya itu bahwa *food estate* itu tidak berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan percepatan proses transformasi sosial ekonomi di bidang pertanian. Ini resmi dari BPK.

Yang kedua, pembangunan *food estate* berbasis korporasi petani, berpotensi tidak terwujud secara menyeluruh pada periode RPJMN 2020-2024 makanya di forum ini tadi saya setuju untuk membuat sikap politik kalau tidak Panja ini harus ada, Pak Ketua.

Terima kasih.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Ketua,

Hermanto, Ketua izin.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Sama enggak halnya *food estate*?

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Ya, penajaman, Pak Ketua, mumpung lagi soal *food estate*.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Yang pertama, Kementerian Pertanian tolong hati-hati soal *food estate* ada sekitar 803,3 miliar. Ini catatan temuan BPK bukan kata kami. Sebelum ada catatan dari kami, BPK sudah memberikan catatan, 2021 itu anggarannya 761 miliar 2022, 739 miliar. Saya mau tanya ke Kementan, Kementan tahu enggak kenapa BPK itu memberikan catatan dan ada temuan ini?

Yang kedua, kalau sudah tahu ada catatan dan temuan, kenapa Kementan masih mau mengalokasikan hari ini sebesar 650 miliar terkait yang ditanyakan oleh teman-teman? Lalu *food estate* ini kalau kita baca secara lebih seksama, secara substansi hampir tidak ada bedanya *tuh* dengan program yang namanya pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP). Itu 2023, anggarannya itu untuk KSPP itu 1,65 triliun. Saya sudah baca, Pak, hampir tidak ada bedanya antara Food Estate dan KSPP ini. Apakah bedanya itu hanya di penyebutan namanya tetapi substansinya programnya sama? Kalau programnya sama terjadi repetisi, pasti nanti akan jadi temuan lagi, Pak. Ya, saya hanya mengingatkan anggarannya tidak kecil loh soal ini, Pak.

Kami tentu mendukung *food estate* ini, mendukung tetapi karena ada catatan, tolong dievaluasi dulu. Tidak bisa diteruskan supaya jangan sampai salah. Dua tahun kemarin pasti polanya salah maka ada temuan. Kalau polanya salah, pola barunya nih seperti apa, Pak, pembenahannya?

Terima kasih, saya kembalikan.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Pak Ketua, Hermanto, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya, satu menit Pak. *Food estate* ya.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Ya.

KETUA RAPAT:

Ya, satu menit, setelah itu kita lanjutkan.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Jadi begini, Pak Ketua, saya hanya mengingatkan kembali juga.

KETUA RAPAT:

Begini apa begitu?

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Ya, maksud saya begitu. Sebelum ada catatan dari BPK dan dibacakan di sidang Paripurna, itu Komisi sudah memberikan penilaian ya kan bahwa Bapak Ketua sendiri mengatakan bahwa *food estate* itu sudah gagal ya. Ada lokasi *food estate* tapi di mana itu *food estate*-nya bagaimana mengangkutnya kalau panen, jalannya ke mana, irigasinya di mana? Itu enggak jelas dan nomenklturnya pun juga ya itu kenapa *kok* diserahkan bukan ke Komisi IV, maksud saya itu ke Kementerian Pertanian? Ya, itu kewenangannya itu atau *leader* nomenklturnya itu ada di kementerian yang lain begitu. Kenapa enggak diserahkan ke Kementerian Pertanian sehingga bisa dievaluasi sejak tadi Komisi IV, itu yang pertama.

Yang kedua, itu *food estate* itu tidak merata di seluruh kabupaten kota. Sumatera Barat saja yang dinyatakan ada *food estate*, setelah saya kunjungi, enggak ada itu di mana itu saya cari barang *kagak* ada. *Nah*, jadi menurut saya ini, Pak Ketua, perlu memang dievaluasi, kalau bisa memang dibatalkan saja *food estate* ini sehingga anggarannya bisa dialokasikan kepada hal-hal yang efektif, yang lebih banyak manfaatnya kepada petani.

Demikian, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Boleh enggak nanti saja sekalian?

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Sedikit saja. Begini ini teman-teman kan ada bilang *food estate* ini ditolak saja, tetapi kita ingat pidato Presiden. Pidato Presiden itu menekankan tentang pentingnya membangun ketahanan pangan. *Nah*, ini diterjemahkan mungkin oleh Banggar, oleh Bappenas lewat program *food estate* ini tetapi karena ada temuan ini, Ini kan harus dievaluasi betul di mana titik-titik celah dan kelemahannya, kan begitu. Jadi bukan cuma sekedar tolak atau terima.

Menurut saya arah pembicaraan kita harus ke sana, tidak bisa dipungkiri juga banyak daerah ini membutuhkan model pembangunan pertanian terintegrasi model *food estate* ini tetapi penyempurnaan itu harus dilakukan.

Nah, ini disebutkan ada 2023 ini ada sekitar 48 wilayah prioritas *food estate*. *Nah*, itu di mana? dasar pilihannya apa? mau dikembangkan komoditi apa di sana? kesiapannya bagaimana? Saya kasih contoh saja dari Dapil saya. Ada satu kabupaten namanya Timor Tengah Selatan (TTS). Di sana ada bendungan besar namanya Temef tapi enggak ada *food estate* di situ. Padahal, mestinya kalau tanya ke saya, saya pasti akan dengan tegas jelaskan TTS tapi enggak ada di situ.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Komisi IV tidak menolak *food estate* tetapi dievaluasi dengan ketentuan jangan menggunakan anggaran yang ada di komisi. Kalau memang mau dilanjutkan, lanjutkan minta anggaran sama Bappenas. Yang menyuruh kan Bappenas kan? ya minta sama Bappenas. Jadi jangan ganggu anggaran kami yang...yang Kementan yang sudah sangat minim sekali ya.

Lanjutkan.

F-P. DEMOKRAT (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):

Izin Pimpinan. Sayap kanan, izin.

KETUA RAPAT:

Habis ini tolong dilanjutkan ya terakhir ya.

F-P. DEMOKRAT (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):

Siap.

Terkait dengan *food estate*, ini program bagus tetapi sering saya sampaikan bahwa tata kelolanya yang memang belum tepat. Saya ingatkan, ini kan terkait dengan lintas kementerian lembaga jadi harus ada payung hukumnya. Indonesia pernah melakukan ini yaitu Kementerian Transmigrasi dulu, jelas *leading sector*-nya siapa. Jadi ini program bagus jangan sampai main stop tetapi kita evaluasi regulasinya seperti apa, kemudian pengawasnya bagaimana di lapangan sehingga ini bisa terwujud dengan baik.

Saya kira itu, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Lanjutkan, Pak Sekjen.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Terima kasih, Pak Pimpinan.

Kami lanjutkan dulu.

Bapak/Ibu sekalian,

Jadi tadi sudah beberapa yang dikaitkan dengan DAK. Prinsipnya memang semuanya ditentukan oleh Bappenas dan Dirjen Perimbangan. Nanti kami tentu mencatat ini sebagai bagian untuk evaluasi Bapak/Ibu sekalian utamanya yang berkait dengan *food estate*.

Baik, untuk kebijakan dan lanjut kebijakan menu DAK ini sebagai berikut Bapak, Bapak/Ibu sekalian. Kami lanjutkan sedikit. Kebijakan DAK nonfisik ketahanan pangan dan pertanian tahun 2023 untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan berorientasi pasar dan memfasilitasi layanan publik khususnya informasi pertanian dan pemenuhan operasionalisasi bagi pelayanan peternakan dan kesehatan hewan.

Kemudian kriteria pemilihan lokasi prioritas, ini semua ditentukan oleh Bappenas Bapak/Ibu sekalian. Kami laporkan 1.255 kelompok masyarakat di 337 kabupaten, kota *stunting* tahun 2022 yang mengalami peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Yang kedua, 5.782 BPP di 508 kabupaten, kota yang menyampaikan pelaporan data informasi pertanian. Yang ketiga, 933 unit Puskesmas di 417 kabupaten, kota yang mampu meningkatkan pelayanan kesehatan hewan di unit kerjanya. Ini pagu alokasinya 300 miliar lebih.

Kemudian untuk menu DAK nonfisik 2023 berkait dengan Pekarangan Pangan Lestari, kemudian biaya operasional BPP biaya operasional Puskesmas. Ini yang menjadi kebijakan daripada menu DAK nonfisik 2023.

Demikian Bapak/Ibu sekalian kami laporkan beberapa. Mohon izin, jika diperkenankan kami lanjutkan dengan rincian Eselon I, Bapak Ketua.

Kami kembalikan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan dilanjutkan Eselon I. Silakan diatur oleh Sekjen.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Siap.

Dirjen Tanaman Pangan, silakan.

DIRJEN TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Terima kasih, Pak Sekjen.
Izin Bapak Pimpinan, Anggota Dewan yang terhormat.

KETUA RAPAT:

Maaf. Sebelum dilanjutkan Dirjen Tanaman Pangan, masih ingat enggak kami, Komisi IV bicara di sini mengenai ada program kerjasama antar Eselon I dengan BPTP. Tahun 2021 menurut Anggota semua termasuk saya ada tapi 2022 *kok* hilang, apalagi 2023, BPTP tidak punya kerjaan karena anggarannya tidak ada. Terus apakah orang-orang pintar BPTP-BPTP setiap provinsi ganggur? Kenapa tidak diberdayakan kerjasama dengan Eselon I?

Contoh, di Dapilnya Ibu Anggi apa sih menjadi unggulan, apa Bu? Jagung, eh pisang, dan jagung. Kenapa enggak BPTP dimanfaatkan untuk pengembangan bibit atau benihnya. Ini *loh*, ini supaya tahu semua. Tadi saya sudah jelaskan dengan berapa Eselon I, di Lampung itu dapat bibit coklat cukup banyak Kabupaten Pesawaran *replanting*, bawanya dari Makassar. Lama perjalanan tiga minggu, yang mati 20%, yang harus diurus dengan saksama 30%. Ongkosnya berapa? biaya yang berapa? yang gagal berapa? Kenapa *sih* tidak dibuat di Lampung? Berapa kira-kira biayanya Dirjen Perkebunan bikin *nursery* sampai 1 miliar, 1,5 miliar? Jawab.

DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Antara 1 sampai 1,5M.

KETUA RAPAT:

Nah, ongkos angkut saja 200.000 pohon dari sana sudah berapa ratus juta, iya kan. Ini memang tidak mau di daerah kan, mau difokuskan beli dari Sulawesi dalam tanda kutip, ya kan. Ya, asal tahu saja yang saya maksud tanda kutip tadi. Saya tidak mau lagi ada seperti itu, ya. Ini saya ingatkan 2023, kalau enggak ada jangan sampai nanti Anggota protes semua keluar, rapat batal ini, ya begitu kan Anggota? Setuju enggak?

Ya, lanjutkan.

DIRJEN TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Terima kasih, Pak Pimpinan.

Realisasi keuangan 2022, Dirjen Tanaman Pangan sebesar 58,6% itu SP2D dan OS kontrak sebagaimana Pak Sekjen disampaikan, datanya sama dan kami ingin mendetailkan yang disampaikan Pak Sekjen tentang progres Bimtek tolong *slide* 6. *Slide* 6, progres Bimtek targetnya tanaman pangan 159 paket, realisasi 105 unit tersebar di 16 provinsi, 69 kabupaten, secara rinci ada di layar dan sisanya dalam waktu dekat untuk terus dikejar.

Selanjutnya kerjasama dengan BPTP, perbanyak benih sumber ini kebanyakan benih padi dan kedelai. Tahun 2021 sudah realisasi semua 15 BPTP dan 2022 di 4 BPTP. Selanjutnya *slide* halaman nomor 9 minta tolong....

KETUA RAPAT:

Jadi 2022 cuma 4 BPTP.

DIRJEN TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Ya, masih segitu.

KETUA RAPAT:

Terus yang 50? Anggota lain yang 50.

DIRJEN TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Ya, di 2023, saya sampaikan sebentar, Bapak Pimpinan, izin.

Slide 9, RKA K/L 2023 pagu Dirjen Tanaman Pangan anggaran 3,09 triliun *dengan* rincian untuk program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas yaitu pengembangan padi, total sejuta 1,1 juta hektar. Ini naik dibanding tahun lalu 1,0 sekian juta, jadi naik sekitar 100-an. Dengan target sasaran 55 ribuan kelompok tani dan diharapkan menyerap tenaga kerja 3 juta dan berkontribusi pada produksi.

Selanjutnya, untuk pengembangan jagung 387.000 hektar. Ini juga naik 7.000 hektar dibanding tahun lalu dengan target sasaran kelompoknya 19.000 kelompok. Peningkatan produktivitas kedelai luas total 369 300 ribu hektar dengan sasaran kelompok 18.000 hektar. Selanjutnya, ada beberapa komoditas pangan lokal.

Sesuai arahan Pimpinan dan Dewan yang ada tentang kerjasama BPTP, perbanyak benih sumber butir 5 itu dialokasikan untuk memproduksi 1.780 ton, nanti kerjasama dengan BPTP dan PBI, sebagian besar untuk mencukupi seluruh kebutuhan yang ada di BPTP, ini cukup, Bapak Pimpinan, jadi sudah kami alokasikan di butir 5,2023.

Kegiatan lain ada sertifikasi uji mutu benih, pengendalian hama penyakit, penanganan kekeringan dan bimbingan teknis atau sosialisasi kepada petani sudah kami anggarkan di 2023 sebanyak 165 paket nanti mohon arahan lebih lanjut.

Kegiatan pasca panen sesuai dengan ketentuan TKDN yang berlaku baik alat-alat pengolahan dan alat-alat panen sebanyak 6.124 unit 2023, meningkat sedikit dibanding tahun lalu dan total Dukman 168 miliar. Target produksi sama dengan yang disampaikan Pak Sekjen 54,5 juta ton padi, jagung 23,05 juta ton, kadar air 27% ini, Bapak, dan kedelai 0,5 juta ton.

Selanjutnya pada *slide* 11, kami sampaikan masing-masing komponen paket padi, jagung, kedelai, Alsin unit *cost*-nya.

Selanjutnya pada *slide* 15, kami sampaikan *slide* 15, rincian alokasi per provinsi, per unit jenis alat-alat mesin. Kemudian *slide* 14, paket-paket komoditas padi, jagung, kedelai dan lainnya, kami sajikan rincian tentatif per provinsi yang akan dialokasikan dan struktur anggaran. Izin Bapak Ketua, Bapak Pimpinan semua, Ibu. Strukturnya lebih besar di pusat sesuai dengan arahan itu untuk tahun 2023.

Demikian. Terima kasih Bapak Pimpinan, Pak Sekjen. Secara detil ada di buku. Mohon saran masukan lebih lanjut.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Izin Bapak, kami lanjutkan.

Dirjen Hortikultura.

DIRJEN HORTIKULTURA KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh,

Bapak Pimpinan, Bapak/Ibu semua yang kami hormati,
Pak Sekjen dan para Dirjen,

Lanjut.

Langsung saja terkait dengan pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2022 dan rencana kerja dan anggaran tahun 2023.

Lanjut.

Ini target realisasinya untuk produksi hortikultura. Jadi untuk cabai tadi sudah disampaikan oleh datanya sama dengan yang disampaikan oleh Pak Sekjen. Namun, ini lebih detail lagi, ada jahe, ada pisang, ada anggrek, ada kunyit, ada manggis, ada krisan dan lain sebagainya. Nanti bisa dilihat di dalam yang sudah kami berikan kepada Bapak/Ibu semua.

Lanjut.

Ini untuk ekspor untuk hortikultura.

KETUA RAPAT:

Tunggu, tunggu, mundur dulu.

DIRJEN HORTIKULTURA KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Kembali.

KETUA RAPAT:

Saya mau tanya, kentang masih impor enggak kita?

DIRJEN HORTIKULTURA KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Kentang, untuk kentang industrinya, Pak, yang masih impor, Pak.

KETUA RAPAT:

Kenapa tidak bisa dibikin di Indonesia?

DIRJEN HORTIKULTURA KEMENTERIAN PERTANIAN:

Ini kita masih dari benihnya yang masih agak kesulitan, Pak. Ini sekarang sedang kita dorong untuk pengembangan benih kentang industrinya, Pak. Jadi supaya kentang industri ke depan, kita bisa mengurangi untuk volume impor kentang industri, Pak. Untuk kebutuhan industri bukan untuk kebutuhan sayur Pak.

KETUA RAPAT:

Kemudian aneka cabai *kok* harga cabai merah, besar, keriting itu masih di atas Rp70.000,00? Impornya kurang atau produksinya enggak ada?

DIRJEN HORTIKULTURA KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Sekarang sudah mulai turun, Pak, karena kemarin memang di bulan Juni, Juli kemarin curah hujan cukup tinggi, cabai banyak yang rusak, Pak, banyak yang kena penyakit. *Nah*, sekarang sudah mulai, mulai menunjukkan ke arah normal, Pak, data yang kami pantau dari tadi malam, Pak.

KETUA RAPAT:

Kemudian saya kritisi ini masalah bunga krisan biasanya kan diekspor ya?

DIRJEN HORTIKULTURA KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Betul, Pak.

KETUA RAPAT:

Berapa persen yang diekspor?

DIRJEN HORTIKULTURA KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Nanti, datanya kami cek, Pak, secara... secara ini, Pak, kami tidak hafal satu persatu karena banyak sekali komoditas hortikultura, mohon izin Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Saya jelaskan kenapa bunga krisan kita tidak bisa ekspor ke Belanda? Kenapa negara-negara lain bisa masuk ke Belanda? Belanda itu tidak punya tanaman bunga kecuali bunga tulip yang lainnya impor dari negara-negara lain karena apa? tidak didukung oleh subsidi angkutan udara. Saya jelaskan tidak disubsidi angkutan oleh angkutan negara kargonya ya maka harganya ya terlalu mahal, enggak bakal bisa masuk. Misalnya dari Tomohon ke Belanda, *wassalam* gak bakal bisa masuk karena kemarin saya ketemu Gubernur Sulut keluhannya salah satunya itu.

Yang kedua, misalnya ada rumah makan Padang di suatu negara di Eropa, itu kan masih ada bahan baku yang diimpor dari Indonesia ke negara tujuan untuk restoran. *Airlines* kita lebih baik kosong daripada mensubsidi ongkos angkut. Kenapa saya katakan demikian? Coba lihat, hampir semua negara ada restoran Vietnam dan Thailand. Kenapa? mereka itu hanya membayar, membayar ongkos angkut bumbu-bumbu, rempah-rempah yang ada dari negara mereka, tidak lebih dari 30%. Maka harganya bisa terjangkau.

Jadi tugas Kementerian Pertanian juga harus melobi Kementerian Perhubungan, daripada slotnya kosong *ngapain* kenapa *enggak* diisi ya.

Lanjutkan, Dirjen Hortikultura.

DIRJEN HORTIKULTURA KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Siap.

Lanjut untuk ekspor kami ini... klik lagi, sekali lagi. Datanya masih belum. Jadi kami ini ada peningkatan ekspor, Pak dari periode dibanding Januari-Juni 2021 dibanding dengan Januari-Juni 2022 jadi ekspor ini yang meningkat ini ada nanas, jeruk, pisang, rambutan, okra, kubis, tomat, mawar, kapulaga, jahe, dan kunyit yang meningkat ekspornya pada periode Januari-Juni 2022.

Lanjut.

Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekjen terkait dengan realisasi keuangan tahun 2022.

Lanjut.

Ini untuk realisasi output, output utama di Januari tahun 2022 untuk kegiatan-kegiatannya untuk bawang merah dengan target 5.983 hektar, realisasi baru 3.065 hektar. Untuk cabai 5.500 hektar, realisasi baru 2.288 hektar dan lain-lain di sini, ada bawang putih juga 1.700 hektar, baru realisasi 571 hektar, kentang 300 hektar, realisasi 270 hektar dan seterusnya semua. Data-data lengkap dari apa yang dikerjakan di tahun 2022 ini.

Lanjut slide berikutnya.

Terkait dengan penyaluran balik, balik, kembali, kembali. Terkait dengan penyaluran bumper di sini alokasinya juga 709,86 miliar, ini baru terealisasi 34,39% atau 244,1 miliar. Untuk pelaksanaan Bimtek ini dari 330 paket, 154 paket baru 154 paket atau masih baru 46,67% dari total paket yang disediakan untuk tahun 2022.

Lanjut, lanjut.

Masuk ke rencana, lanjut masuk ke rencana kegiatan utama Dirjen Hortikultura. Jadi di sini ada beberapa kegiatan dari Direktorat Jenderal Hortikultura. Kami bagi di kegiatan peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat. Di sini ada kampung sayuran dan tanaman obat. Ada kampung bawang merah seluas 7.132 hektar dengan rincian, ada untuk intensifikasi dan ada bawang merah yang menggunakan biji sibling, ini kurang lebih sekitar 300 hektar. Untuk yang intensifikasinya 4.792 hektar dan ekstensifikasinya 2.040 hektar.

Untuk kampung aneka cabai ada 6.000 hektar dan kampung jahe sesuai dengan hasil RDP sebelumnya, kampung jahe untuk ditingkatkan jahe kita tambahkan jadi 1.000 hektar dan kampung tanaman obat lainnya ada kunyit, kapulaga, kencur, temulawak, jeruk nipis, lengkuas dan lain sebagainya, itu juga sebanyak 1.000 hektar. Bawang putih tetap kami alokasikan 1.700 hektar.

Ini tadi yang ditanyakan oleh Pak Ketua terkait dengan kentang industri. Ini juga sudah kami alokasikan untuk kentang industri kita dorong untuk perbenihannya nantinya, ini seluas 300 hektar dan kampung sayuran lainnya kami juga untuk substitusi impor akan kami dorong juga untuk pengembangan bawang bombai walaupun masih dalam skala yang tidak terlalu luas karena memang kita bawang bombai 100% ini masih impor, dan ternyata dengan teknologi yang sudah ada sekarang bawang bombai sudah mulai bisa dikembangkan di daerah tropis dan kita akan dorong untuk pengembangan bawang bombai ke depan.

Dan untuk P2L masih tetap kami alokasikan 1.650 kelompok dengan alokasi anggaran Rp84 miliar. Dan lain sebagainya termasuk juga di sini ada bimbingan teknis senilai Rp8 miliar.

Lanjut.

Untuk peningkatan produksi buah dan florikultura, ini ada kampung buah dan florikultura, ada kampung pisang, kampung manggis, kampung durian, kampung mangga, dan kampung kelengkeng dengan volume yang ada di samping ini dan kami juga untuk kampung buah lainnya kami dorong juga untuk salak, melon, nanas, stroberi, anggur dan buah-buahan lainnya. Di sini juga untuk kampung bunga tadi disampaikan juga ada krisan, anggrek, untuk mawar, melati, drasaina tanaman hias lainnya, kami siapkan juga dan di sini juga ada untuk bimbingan teknisnya, kami alokasikan sebanyak kurang lebih 8 miliar di kegiatan ini.

Selanjutnya, untuk perlindungan hortikultura. Untuk perlindungan hortikultura, kami melaksanakan untuk kegiatan pengendalian hama terpadu terus pengendalian organisme pengganggu tumbuhan hortikultura dalam rangka mitigasi dampak perubahan iklim. Terus untuk penanganan dampak perubahan iklim melalui pompa teknologi hemat air, irigasi tetes, sumur, biopori dan lain sebagainya. Terus juga ada kegiatan bimbingan teknisnya dalam hal ini. Total anggarannya untuk perlindungan hortikultura ada Rp59,55 miliar.

Untuk perbenihan hortikultura. Lanjut. Jadi perbenihan hortikultura dalam rangka mendukung kampung-kampung hortikultura yang akan kami kembangkan. Jadi, untuk kampung hortikultura tahun 2023 nanti, benihnya sudah kita siapkan di tahun 2022 ini sehingga kampung-kampung hortikultura yang dikembangkan di tahun 2023 tidak tidak mengadakan benih kecuali hanya benih manggis saja.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Singkat, Pak.

DIRJEN HORTIKULTURA KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Ya siap.

Di sini kami jelaskan sekilas tentang ada mungkin ada... ada benih untuk persiapan tahun 2023 karena memang untuk produksi benih memang memerlukan waktu paling tidak itu satu tahun. Misalnya kalau pisang, kita siapkan di tahun 2023 nanti, itu untuk keperluan nanti untuk tahun 2024. Demikian juga benih buah-buahan lainnya untuk durian dan lain sebagainya itu untuk keperluan tahun 2024 yang akan disiapkan diproduksi di tahun 2023 nanti. Jadi penjelasannya ada di data-data ini semuanya.

Selanjutnya, untuk nilai tambah dan daya saing industri, ini ada pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura, alokasi anggarannya totalnya 173 miliar ini banyak kepada upaya untuk penumbuhan usaha mikro kecil dan menengah di hortikultura dengan berbagai macam kegiatan yang kita alokasikan termasuk untuk sarana prasarana pengolahan pasca panen dan lain sebagainya.

Lanjut.

Untuk dukungan manajemen ada senilai 122 miliar dengan alokasi anggaran terkait dengan dukungan manajemen yang ada di Direktorat Jenderal Hortikultura.

Demikian, kami sampaikan. Kami kembalikan Pak Sekjen.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Izin, Ibu Pimpinan, kami lanjutkan.

Dirjen Perkebunan.

DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Terima kasih atas kesempatannya, Pak Sekjen.

Bapak/Ibu Pimpinan yang saya hormati, dan
Teman-teman Komisi IV yang saya banggakan,

Perkenalkan kami dari Direktorat Jenderal Perkebunan untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan realisasi anggaran tahun 2022 dan rencana anggaran tahun 2023. Lingkungan strategis perkebunan saat ini dihadapkan pada kondisi tingginya tanaman rusak dan tidak terawat. Kita juga dihadapkan pada produktivitas komoditas yang belum optimal, ditambah lagi terbatasnya akses terhadap pupuk bersubsidi dan kenaikan harga BBM. Ini yang akan mewarnai kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun 2023 termasuk saran-saran dari teman-teman Anggota, Bapak/Ibu Anggota Komisi IV termasuk pembangunan *nursery* dan lain sebagainya, pengembangan benih unggul akan kita kedepankan.

Di tengah... halaman 5, di tengah tekanan berbagai hal yang kami sampaikan di atas, PDB perkebunan triwulan ke-2 tahun 2022 masih mengalami kenaikan 0,27% dari 109,865 menjadi kuartal ke-2 tahun 2022 menjadi 110,160.

Lanjut, di halaman 8. Kalau kita melihat dari diagram yang kita lihat di atas bahwa kontribusi terhadap PDB kita masih didominasi oleh kelapa sawit dan kita ada kesempatan untuk meningkatkan ekspor perkebunan kita dari misalnya karet, kelapa, kakao, kopi dan lainnya.

Adanya peristiwa *frosting* di Brazil, itu akan menjadi Brazil ada kegagalan panen di Brazil yang membutuhkan 4 tahun Brazil untuk pulih perkebunan kopinya. Ini mungkin menjadi tantangan kita ke depan untuk ekspor kopi kita di sentra-sentra yang selama ini berhasil ekspor.

Lanjut, di halaman 9, ini adalah realisasi produksi komoditas perkebunan sama tadi dengan disampaikan oleh Pak Sekjen.

Mungkin kita lanjut ke halaman berikutnya, halaman 10. Target dan realisasi produksi komoditas perkebunan sampai Agustus Tahun Anggaran 2022 untuk kelapa sawit realisasi sudah 31,99 juta ton dari target 52,87 jadi artinya ada 60,50%. Karet dari target 3,37 ton telah terealisasi 2,26 atau realisasinya sudah 66,85%. Kelapa 1,68 juta ton dari target 2,79 juta ton artinya sudah terealisasi 60,2% dan mungkin bahan ini bisa tidak saya presentasikan keseluruhan sudah disampaikan kepada Bapak/Ibu Anggota Komisi IV.

Selanjutnya, berdasarkan halaman 11, kami ingin menunjukkan bahwa berdasarkan belanja porsi anggaran kita di Direktorat Jenderal Perkebunan untuk tahun 2022, belanja barang 88%, belanja modal 5% dan belanja pegawai 7%. Dari berdasarkan program nilai tambah, program nilai tambah ada 78% dan dukungan manajemen 22%.

Lanjut, halaman 12. Capaian output kegiatan untuk program pengembangan kawasan tanaman tahunan dan penyegar capaian *output*-nya sampai hari ini 39,71%, capaian keuangannya 40,88%. Untuk penguatan perlindungan perkebunan, capaian *output*-nya sudah 85,60% capaian keuangannya sudah mencapai 69,62%. Untuk dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di Dirjen Perkebunan, capaian *output*-nya 72,32% capaian keuangannya 53,9%. Untuk pengembangan kawasan tanaman semusim dan rempah capaian *output*-nya 43,92% capaian keuangan sudah 39 koma mencapai 25%. Untuk pasca panen hilirisasi dan pemasaran hasil perkebunan ini capaian *output*-nya 23,83, capaian keuangannya 27,76, dan untuk penguatan perbenihan tanaman perkebunan capaian outputnya 26,40% ini ada *nursery* modern yang kita bangun di Cianjur yang cukup besar anggarannya ini yang agak membuat capaiannya agak kurang tinggi. Dari keseluruhan anggaran yang ada di Direktorat Jenderal Perkebunan, capaian keuangannya sudah mencapai 42,38%.

Lanjut, lanjut di halaman 16. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi bahwa dengan *automatic adjustment*, anggaran kita capaian anggaran kita di luar *outstanding contract* sudah mencapai 42,38% tapi kalau dengan *outstanding contract*-nya sekarang tadi itu hampir 57%.

Lanjut, di realisasi, sekarang kita masuk ke Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023. Lanjut halaman 19. Ini target produksi untuk 2023 untuk kelapa sawit 56 juta 56.000 ton, kopi 810.000 ton, kakao 782.000 ton, kelapa 2.997.000 ton, karet 3.436.000 ton, tebu 37.000 ton, jambu mete 140.000 ton, cengkeh 147.000 ton, lada 92,74 ribu ton, pala 41,57 ribu ton, vanili 1,89 ribu ton, teh 141,52 ribu ton.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI(ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Pak, ini bacanya bagaimana *sih?* yang 56.000 ton juga yang 1 koma yang vanili juga ribu ton juga.

DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN:

56.000 ton.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

56.000 ton. Yang 1 koma, yang vanili itu berapa? seribu atau berapa? Tadi Bapak bilanginya.

DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Seribu koma 89 ribu ton.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Tadi bilanginya ribu.

DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Ya, mohon maaf.

Lanjut.

Kami ingin menunjukkan kondisi *existing* perkebunan. Kami lanjutkan pada rancangan pagu anggaran tahun anggaran 2023. Lanjut, lanjut halaman 25, 25, yang rancangan pagu anggaran tahun anggaran 2023, porsi anggarannya belanja barang 77%, belanja pegawai 8% dan belanja modal 15%. Untuk program dukungan manajemennya 18% dan nilai tambah daya saing 82%. Untuk program nilai tambah, lanjut, halaman 25. Untuk program nilai tambah dan daya saing industri ada logistik benih 19.507.000 benih dengan nilai 428 miliar, itu adalah pembangunan pemeliharaan kebun sumber benih tanaman perkebunan, pemeliharaan *nursery*, rekomendasi benih tanaman perkebunan, pengawasan benih komoditas perkebunan, pengujian mutu benih dan pembangunan *nursery* modern perkebunan kelapa dan uji DNA.

Terus, untuk penyediaan benih tanaman perkebunan unggulan lainnya kita menargetkan 19.507.000 batang dengan anggaran 201 satu miliar di antaranya ada kopi, kakao, kelapa, jambu mete, karet, sagu, pete, aren pinang, pala dan sudah disampaikan ini. Lanjut untuk pengembangan kawasan perkebunan unggulan nasional berbasis korporasi petani ada 48.615 hektar dengan nilai 144,26 miliar. Untuk program dukungan manajemen ada anggaran 200 miliar.

Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Izin, Ibu.

Pak Dirjen Peternakan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Ini Dirjen Peternakan yang disampaikan berbeda ya yang di yang sudah dikirimkan ke Bapak/Ibu ini belum ter-*update* ya kan begitu karena nanti mungkin...saya kasih tahu ke Bapa/Ibu saja, notifikasi bahwa yang disampaikan mungkin akan berbeda karena yang yang terbaru baru di fotokopi. Baru mau akan dikirim, benar begitu?

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Angka-angka mungkin akan ke PMK kali Bu...*(suara tidak jelas)* ini kan kami akan sampaikan terkait dengan anggaran kemudian realisasi.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Coba Pak Andi, dimatiin. Kita berpatokan pada yang paparan yang ada di *slide* yang ada di layar ya.

Silakan Pak.

INTERUPSI:

Interupsi.

Atau Dirjen yang lain dulu saja, Bu Ketua, sambil menunggu fotokopiannya kalau masih belum semua.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Sudah, Pak, yang fotokopi itu kan untuk kaitan dengan data PMK terbaru.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Oh, data PMK terbaru.

Bapak/Ibu bagaimana? kita ke Peternakan atau Dirjen yang lain? Lanjut ke Peternakan.

Silakan Pak Nes.

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN
PERTANIAN RI:**

Terima kasih.

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati,

Kami mulai dengan *slide* 4. Untuk tahun 2022, berdasarkan kegiatan maka realisasi kami per 2 September adalah 28,31. Ini cenderung turun dari angka yang awal sebelum adanya penambahan dari PEN sehingga per hari ini per 2 September masih pada posisi 28,31, itu berdasarkan per kegiatan. Kalau kita lihat per belanja maka memang di belanja pegawai dan belanja modal ini yang tertinggi karena adanya tambahan ini. Kalau belanja pegawai dari awal sudah 72,86%.

Kemudian, per kewenangan tugas perbantuan itu memang realisasinya agak kecil dan sekarang masih progres karena di sana banyak kegiatan yang kaitan dengan PMK khususnya pembayaran operasional pada petugas vaksinasi dan pendataan, serta beberapa sarana obat dan penyimpanan obat dan vaksin yang ada dilakukan melalui pengalokasian anggaran tugas perbantuan.

Lanjut, ke *slide* 6. Untuk realisasi kegiatan utama per 31 Agustus seperti yang tertera di sini beberapa yang kaitan dengan ruminansia besar memang masih rendah akibat dari pada PMK ini. Adanya pembatasan dan sumber-sumber ternak yang terbatas. Namun, dengan adanya penurunan kasus yang signifikan maka sudah mulai kita lakukan kembali dan *Insyah Allah* di November kita akan selesaikan secara berkala.

Slide 8, untuk bantuan Pemerintah saat ini pada posisi 23,79 seperti yang disampaikan tadi adanya PMK sehingga banyak di khususnya di sapi perah dan sapi potong belum terlaksana dengan baik. Namun, seperti misalnya di babi sudah pada posisi 52%. *Insyah Allah* pada Bulan November akan kita selesaikan semua.

Kemudian *slide* 11 kaitan dengan Bimtek. Dari Tahun 2022 ini, total Bimtek di PKH adalah 159 untuk alokasi 53 anggota dan alokasi setiap anggota tiga kali Bimtek dan saat ini sudah teralokasi, sudah dilaksanakan sebanyak 133 kali atau 83,6% dan yang belum akan diagendakan 9 September dan 11 September kemudian 6 September dan 6 eh 15 September sehingga diharapkan bahwa September ini sudah selesai semua sebanyak 159 kali.

Untuk 2023 sebagai gambaran, halaman slide 26. Proporsi anggaran untuk GPK tahun 2023 berdasarkan per program adalah program ketersediaan akses konsumsi sebanyak 87,92% atau 2,5 triliun. Kemudian program nilai tambah pada posisi 1,03% atau 29,61 miliar dan program dukungan manajemen 11% atau sekitar 319.

Kalau berdasarkan per jenis belanja, belanja pegawai 4,94. Belanja modal 4,57 dan didominasi oleh belanja barang sebesar 90,49 dengan alokasi

per kewenangan untuk pusat 1,5 triliun kemudian kantor daerah 1,002 triliun dan tugas perbantuan 374, di dalam sini ada BLU, PNPB dan juga SBSN.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan gambaran tentang program dan realisasi 2022 dan rencana 2023. Mohon arahan lebih lanjut.

Terima kasih.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Izin, Bu.

Dirjen PSP. Mohon singkat Pak.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Baik.

Bismillahirrahmanirrahim.

Ibu Ketua, Bapak/Ibu semua Pimpinan, Bapak/Ibu semua Anggota Komisi IV yang kami banggakan, kami hormati,

Izin, kami sampaikan dari PSP, Bu. Bu Ketua yang *slide* pertama ini adalah terkait dengan realisasi anggaran kita di 2022, ini seperti apa yang disampaikan Pak Sekjen tadi per 2 September, per hari ini sebenarnya kita sudah di posisi 44,86 dengan kalau dimasukkan tadi yang *outstanding contract* itu sekitar 55 dan kalau *automatic adjustment*-nya dikeluarkan itu sekitar 57% Ibu Ketua, Bapak/Ibu semua.

Terus *slide* 2 di atasnya, *slide* 7 langsung. Upaya percepatan penggunaan anggaran tentunya beberapa poin kami sampaikan, terus, bukan, *slide* 7, *slide* 7, Mas, ya ini. Ya, ada poin di sini ada paling tidak 4 poin yang kita lakukan untuk percepatan ini Bapak/Ibu semua. Nanti kami kasih data-datanya semua kira-kira di mana ini kondisinya, posisi kita masih di posisi sekian.

Slide berikutnya ini di capaian kegiatan Banpem, Banpem aspirasi.

Bapak, Ibu semua,

Izin, kami sampaikan di sini ini posisi kita yang aspirasi itu sudah sekitar 46% realisasi kita yang sama sekali ini sedang dalam persiapan Bapak/Ibu semua ini adalah transportasi untuk roda 3 ini sedang kita persiapkan dokumennya untuk pelaksanaannya. Terus kemudian yang lain yang Alsintan yang lain termasuk JUT dan RJIT itu sudah jalan dengan posisi sekitar 46%.

Tentunya dalam hal ini, kami mohon bantuan Bapak/Ibu semua, kami sudah ada sekitar 4 kali bertemu dengan rekan-rekan para TA. Komunikasi

kami dengan mereka nanti per tanggal 9 Bapak/Ibu semua, kami juga akan dibawain mudah-mudahan itu mudah-mudahan CPCL yang semua dari Bapak/Ibu semua Anggota tim dari Komisi IV tentu mudah-mudahan bisa ada percepatan untuk CPCL kita.

Terus kemudian slide berikutnya adalah pencapaian kegiatan Bimtek, yang Bimtek ini *alhamdulillah* ini baru 57% Bapak/Ibu semua. Dari 162 target kita baru yang terealisasi ini adalah 93 57,41%. Harapan kami, tentunya juga penentuan-penentuan waktu dari Bapak/Ibu semua yang kami hormati, mohon ada bisa dibantu supaya ini juga bisa tepat kita lakukan dan kita selesaikan Bapak/Ibu semua.

Nah, terus kemudian untuk rancangan, izin kami sampaikan di slide 9 ini karena ada *refocusing* di kesimpulan Raker kita kemarin, kami mengusulkan Bu Ketua, Bapak/Ibu semua kalau ini diperbolehkan Bu, Bapak/Ibu semua. Ada kegiatan kita di situ yang bengkel Alsintan. Bengkel alsintan itu ada 36 unit dengan total anggaran itu 10,8M. Kami tadi menghitung-hitung kalau itu 55 satu per Anggota misalnya itu satuannya menjadi tidak cukup dengan harga daripada yang di *e-katalog* untuk bengkel Alsintan ini. Kami mohon arahan nanti untuk yang poin itu, mungkin itu akan kami *refocusing*, nanti mohon arahnya Pimpinan atau Bapak/Ibu semua ke mana itu harus kita revisi untuk bisa kita laksanakan kegiatan itu.

Terus untuk 2023, Bapak/Ibu semua seperti apa yang sudah disampaikan Pak Sekjen di Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian itu anggaran kita di 2023 itu 2,7 triliun turun turun sekitar 500M dibanding dengan 2022. Rinciannya atau rekapnya di *slide* berikutnya Bapak/Ibu semua gambarannya seperti ini. Itu totalnya 2,7 kegiatan irigasi ini ada peningkatan sekitar 250-an dari tahun lalu. Terus kemudian perluasan perlindungan lahan ini ada sekitar 50-an ada penambahan tapi di Alsintan Bapak/Ibu semua ini kita dari 528 tahun 2022 ini, ini hanya tinggal 185. Terus kemudian demikian juga pupuk dan lain-lainnya. Jadi ini kita 2,7 triliun di 2023.

Slide berikutnya untuk yang DAK kami pikir, enggak kami sampaikan karena sudah disampaikan oleh Pak Sekjen. Mungkin itu yang kami sampaikan, Pak Sekjen, uraiannya itu sudah ada di bahan yang sudah di Bapak/Ibu semua rincian yang untuk 23 Bapak/Ibu semua.

Nah, untuk yang terkait juga dengan progres kita, beberapa kegiatan kita yang di UPO misalnya begitu Bapak/Ibu semua. Terus kemudian yang RJIT, JUT semua kami seperti yang tadi kami sampaikan tadi sudah komunikasikan dengan rekan-rekan TA, Bapak/Ibu semua untuk bisa kita lakukan percepatan untuk bisa kita selesaikan dengan baik.

Saya pikir itu, Pak Sekjen, Bapak/Ibu semua yang kami sampaikan. Mohon arahan dan bimbingannya nanti.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Selamat pagi

F-P. GOLKAR (TETI ROHATININGSIH, S.Sos.):

Izin Bu.

INTERUPSI F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M):

Pimpinan interupsi bisa? Masalah PSP ini.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Biar kita selesaikan dulu saja semua.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M):

Enggak mengingatkan saja, Ketua, Pimpinan ini mengenai masalah tadi bengkel ya. Seingat saya, Bu Ketua, itu....

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Silakan. Oke baik.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M):

Bu Ketua, itu yang diputuskan itu bukan bengkel tapi *mobile* bengkel, Pak.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Mobile ya.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M):

Mobile bengkel. Kalau bengkel memang anggarannya enggak cukup Pak 10 miliar Pak, Pak Dirjen ya.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Bengkel yang muter-muter.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M):

Saya ingatkan saja rapat terakhir, Pak. Jadi *mobile* bengkel Pak bukan bengkel, bengkel enggak cukup lah, Pak.

Terima kasih.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN KEMENTERIAN
PERTANIAN:**

Izin, Bu Ketua.

F-P. GOLKAR (TETI ROHATININGSIH, S.Sos.):

Pak, kalau yang ... (*suara tidak jelas*) *dryer-dryer* 30 ton itu kan tidak jarang yang terserap, apa nanti dialihkan saja ke cultivator lebih banyak apa mungkin ke traktor roda tiga ini yang permintaan dari bawah karena kemarin kita sulit-sulit CPCL-nya. Rata-rata yang 30...(*suara tidak jelas*) ton *dryer*.

WAKIL KETUA KOMISI (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Ya, Bu nanti itu juga bagian yang akan kita bicarakan.

Silakan.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN KEMENTERIAN
PERTANIAN:**

Izin, Bu Ketua.

Merespons Pak iya Pak Andi, Bapak itu memang yang *mobile*, Pak, kita siapkan, Pak, yang *mobile* bengkel Alsintan, Pak, itu, Pak, yang kita hitungkan harganya tadi itu, Pak. Jadi itu hanya ada satu di *e-katalog* harganya itu sekitar 205 sekitar 230 dengan ongkirnya, Pak. Jadi kalau kita hitung tadi 55 Anggota misalnya begitu, Pak,sss itu enggak cukup 10,8 itu. Itu sebenarnya, Pak.

Terima kasih, Bu Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Baik, dilanjutkan.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Baik. Izin Bu.

Kami lanjutkan Badan SDM.

**KA. BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
(BADAN PPSDMP) KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Baik.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh,

Yang kami hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV yang saya muliakan,

Mohon izin, kami melaporkan *progress* dan evaluasi pelaksanaan program 2022 dan rencana 2023. Ya, ini adalah serapan per tanggal 2 September 2022 sudah disampaikan Pak Sekjen tadi. Jadi Badan SDM untuk realisasi dan *outstanding contract* 62,59%.

Ya terus. *Nah*, kemudian untuk *progress* bantuan Pemerintah halaman 6 mohon langsung halaman 6, itu realisasinya sampai saat ini adalah 54,09% berarti yang belum kurang lebih sekitar 46%. *Nah*, kemudian untuk Bimtek ya terus halaman 7 yang sudah terealisasi itu 79,47% dari total anggaran 16,5 miliar.

Kemudian juga untuk rencana 2023, mohon izin kami laporkan halaman 10, anggaran Badan SDM saat ini adalah 946 miliar turun sekitar 100 miliar dibandingkan dengan tahun lalu, terdiri dari program pendidikan dan pelatihan vokasi itu 661 miliar dan dukungan manajemen Rp284 miliar masing-masing terdiri dari kegiatan ada termasuk untuk honor THL dan insentif BOP, kemudian project PHLN, kelembagaan ekonomi petani, kemudian sekolah lapang, pengawalan pendampingan ini untuk 34 provinsi melalui dekon dan ada juga pelatihan vokasi dan sertifikasi profesi bidang pertanian.

Kemudian, di halaman berikutnya ya, halaman 11 ada penumbuhan P4S, kemudian belanja modal sarana pendidikan dan pelatihan juga termasuk PNBPN ini untuk 20 UPT kita. Kemudian juga, ada kegiatan penumbuhan wirausaha muda pertanian, penyelenggaraan pendidikan vokasi pertanian ini termasuk penyeteraan pendidikan D3, D4 bagi para Penyuluh Pertanian yang belum memenuhi syarat sesuai dengan Permenpan-RB tahun 2020. Kemudian fasilitasi pembelajaran dan praktek bagi SMK, SMK ...(*suara tidak jelas*) di daerah. Kemudian dukungan manajemen sebesar 284 miliar terdiri dari pendidikan formal S2 dan S3 bagi ASN Kementan melalui tugas belajar, kemudian pelatihan bagi PNS Kementan, ini ada yang prajabatan ada PIM 3 dan PIM 2, kemudian dukungan manajemen, belanja pegawai, belanja modal dan PNBPN.

Kemudian juga seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Sekjen, menu DAK untuk lingkup Badan SDM ini terdiri dari DAK fisik maupun nonfisik. Untuk DAK fisik, halaman 13 terdiri dari renovasi Balai Penyuluhan Pertanian dan sarana pendukung lainnya. Kemudian yang kedua kegiatan pertanian regenerative. Sedangkan menu nonfisik terdiri dari paket data penyuluhan pertanian selama satu tahun, kemudian juga biaya operasional admin DPP terdiri dari transport, pendampingan dan penyusunan serta penyusunan peta geospasial.

Saya kira demikian.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Terima kasih.

Izin Bu, kami lanjutkan.

WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Tinggal berapa lagi? Tiga?

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Ya. Kepala Litbang, Karantina sama Irjen.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Oh, ya silakan. Kalau bisa Jam 13.00 WIB sudah selesai.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Pak Kepala Litbang.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Silakan.

KEPALA LITBANG KEMENTERIAN PERTANIAN:

Baik.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh,

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang sama-sama kita banggakan,

Izin menyampaikan beberapa hal, *slide* nomor 4. Izin Bu Ketua, Litbang tahun 2020 ini praktis tidak ada aktivitas program yang kita bisa laksanakan kecuali terkait dengan manajemen operasional kantor karena anggaran sedari awal sudah di anggaran 213 miliar dari awal tahun sudah diblokir untuk dipindahkan ke BRIN. Ini termasuk alokasi anggaran untuk Dapil, biasanya ada perbenihan dan Bimtek 1,5 miliar itu masuk di 213 miliar ini dan ada juga *automatic adjustment* 53 miliar. Kalau di luar ini, alokasi realisasi kita sudah sudah mencapai 60,79%.

Lanjut, ke halaman 8. Izin menyampaikan Bu Ketua, alokasi anggaran 2023 karena Perpres kita belum keluar sampai hari ini ada kurang lebih 814.501, ini semuanya untuk operasional perkantoran dan belanja pegawai. Ada 74 miliar yang dititip di Dirjen Tanaman Pangan dan... dan 15 miliar untuk kelihatan ... (*suara tidak jelas*). Kita usulkan 428 miliar, Bu Ketua, untuk setelah Perpres keluar dan ini mudah-mudahan kalau sebelum pagu alokasi anggaran

akhir September keluar ini Perpres-nya bisa keluar kita sudah punya program untuk badan baru ini kurang lebih 428 miliar yang akan kita usulkan.

Itu mungkin dari Litbang.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Wa'alaikumsalam

Badan Karantina.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Silakan diteruskan.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Izin.

KEPALA BADAN KARANTINA KEMENTERIAN PERTANIAN:

Terima kasih, Pak Sekjen.

Yang terhormat Ibu Pimpinan, Bapak, Ibu seluruh Anggota Komisi IV yang saya hormati,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Izinkan menyampaikan secara singkat dari Barantan. Kami mulai dari halaman 5, alokasi anggaran Badan Karantina tahun 2022 sebesar 1,1 triliun, realisasi hingga saat ini telah mencapai 58,53% tapi dengan *outstanding contract* itu mencapai 61,5% tetapi dengan memperhitungkan bila kita keluarkan *automatic adjustment* saat ini sudah mencapai 64,24%.

Selanjutnya, realisasi PNBK Badan Karantina Pertanian dari total 1,1 itu ada 252,7 miliar, realisasi 51,2% untuk realisasi belanjanya dan realisasi penerimaan kita sampai hari ini sudah mencapai 85,21%. Kemudian, lanjut untuk proses pelaksanaan Bimtek, kami sampaikan ada 162 target Bimtek. Dari 162 itu telah terealisasi 52 paket, masih ada 110 paket dan prinsip kami sangat sudah sangat siap tinggal menunggu realisasinya.

Kemudian, lanjut halaman 12. Ini mengingatkan saja bahwa dengan Undang-Undang 21 bahwa tugas dan kewenangan tanggung jawab Barantan termasuk keamanan pangan ada peningkatan di situ.

Lanjut saja. Lanjut ke halaman 15 saja, pagu Badan Karantina Pertanian tahun 2023 mengalami penurunan sedikit dibandingkan tahun 2022 senilai 1,09 yang lalu 1,1 triliun. Kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional Badan Karantina Pertanian dan dari alokasi yang anggaran yang ada, kami upayakan di tahun 2023 ini melakukan efisiensi-efisiensi untuk kegiatan operasional karena kita arahkan lebih banyak untuk membantu mengatasi dampak PMK kemarin, kita lakukan penguatan-penguatan laboratorium, memberikan bahan-bahan peralatan-peralatan itu sehingga kita bisa lebih optimal.

Saya kira demikian, Ibu Pimpinan, Bapak/Ibu sekalian, selengkapnyanya ada dalam buku laporan, mohon arahan selanjutnya.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Izin, Bu.

Terakhir Pak Irjen.

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Terima kasih, Pak Sekjen.

Bu Ketua dan Anggota yang kami hormati,

Sebagai fungsi dukungan dari pelaksanaan tugas Inspektorat terhadap Kementerian dapat kami, sampaikan langsung di halaman 5 saja. Sejak 20 April itu, kami mencanangkan satu program yang disebut dengan Jaga Pangan. Program ini adalah suatu strategi pengawasan dalam konteks memberikan dukungan terhadap program-program Kementerian Pertanian agar berjalan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.

Fokus dari kegiatan kami adalah difokuskan kepada program-program strategis nasional, prioritas dan super prioritas, membangun Sinergi APIP dan APH untuk mewujudkan ketahanan pangan, mewujudkan pembangunan pertanian yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan membangun sistem pelaporan yang terintegrasi agar akses informasi pembangunan pertanian didapat secara cepat, tepat dan akurat serta membangun kemitraan yang strategis dengan *stakeholder* pertanian.

Dalam konteks selanjutnya, kami telah melakukan program terhadap rencananya tahun ini terhadap 10 provinsi. Namun, karena keterbatasan anggaran, kami baru mencapai kepada Provinsi Sulawesi Utara, kita fokuskan kepada daerah-daerah perbatasan kemudian Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat dan Aceh.

Berikut, selanjutnya slide berikutnya ya. Dari 18,5 triliun anggaran Kementerian Pertanian kami mendapatkan anggaran sebesar 97 miliar atau hampir mencapai setengah persen dari program pengawasan. Untuk itu, hingga saat ini kita telah melakukan penyerapan anggaran hingga sebesar 63,97% atau dalam jumlah rupiahnya adalah sebesar 62,487 miliar. Dari kegiatan ini diharapkan, kami telah mengajukan suatu permohonan kepada Menteri Pertanian untuk mendapatkan alokasi anggaran tambahan di tahun 2022 ini yaitu sebesar 40 miliar yang diharapkan dapat mendapatkan dukungan Pimpinan dan juga persetujuan dari Anggota Dewan dalam rangka memperkuat kebijakan pengawasan di halaman 14 yang akan digunakan untuk rangkaian kegiatan sebagai berikut: Yang pertama adalah audit kegiatan strategis nasional, prioritas dan super prioritas, evaluasi capaian kinerja strategis dalam kerangka periode Renstra 2020-2024. Kemudian tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil BPK, monitoring dan evaluasi penanganan PMK, rapat koordinasi pengawasan dalam rangka sinergitas APIP dan APH dalam mengawal ketahanan pangan di 5 provinsi yaitu 5 provinsi perbatasan lainnya yaitu Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Papua dan Maluku. Kemudian membangun dialog Jaga Pangan, peningkatan kapasitas APIP melalui kapasitas *building* dan Diklat teknis bagi pegawai auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal, pengembangan sistem integrasi Sijampang (Jaga Pangan), sarana dan prasarana pendukung pengawasan. Dengan jumlah anggaran ini diharapkan dapat mencapai ke kesamaan dengan program yang akan kita capai di anggaran yang diprogramkan di tahun 2023 yang akan datang.

Demikian, kami sampaikan.

Terima kasih.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Terima kasih.

Izin Bu, kami kembalikan ke Ibu. Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Wa'alaikumsalam warahmatullah wabarakatuh

Terima kasih Pak Sekjen dan Bapak Eselon I semua atas paparannya.

Bapak/Ibu Anggota,

Ada beberapa hal yang pengen saya sampaikan, pertama adalah.. satu hal bukan beberapa hal. Banyak aspirasi yang memang Bapak/Ibu belum menyampaikan CPCL-nya, jadi ini juga menjadi catatan juga kayak misalnya P2L, ini kan sebenarnya program idola ya kalau di lapangan tapi ternyata juga penyerapannya juga masih belum ada separuh, ya Pak Dirjen ya? Belum ada

separuh. Oleh karena itu, juga mohon perhatian Bapak/Ibu untuk bisa mempercepat proses ini.

Nah, saya tawarkan kita akan Paripurna jam 13.30 WIB Bapak/Ibu Anggota terutama sedangkan pasti perlu salat dan makan siang. Jadi saya tawarkan untuk kita skors jam sekarang. Lalu kemudian kita balik lagi jam 16.00 WIB, jam 16.00 WIB ya karena perkiraan jam 16.00 WIB atau jam 15.30 WIB? 15.30 WIB ya, 15.30 WIB kita masuk lagi, saya tawarkan oke, begitu setuju Bapak/Ibu, Pak Sekjen?

(RAPAT DISKORS PUKUL 13.00 WIB)

Kita balik lagi 15.30 WIB di ruangan ini.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

WAKIL KETUA KOMISI DPR RI(ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Bapak/Ibu,

Kita mulai lagi rapat kali ini, skors saya cabut.

(SKORS DICABUT PUKUL 15.30 WIB)

Silakan, Pak Ketua.

Tadi kita sudah mendengarkan semua paparan dari Eselon I Kementan dan selanjutnya apakah ada dari Bapak/Ibu yang pingin yang ingin mengutarakan atau pingin memberikan respons dari semua paparannya Kementan Eselon I.

Saya persilakan.

..... :

...(suara tidak jelas)

Ya. Ini daftar lagi berarti 1, 2 ya, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6, 6 ya cukup. Enam kita ketok 6 nanti setelah.

KETUA RAPAT:

Saya perpanjang dulu karena tadi kan jadwalnya 14.20 WIB, saya perpanjang dulu.

(KETUK PALU 1 KALI)

Kalau bisa sebelum maghrib kita akhiri karena kita mau salat magrib.

Silakan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Silakan Pak Azikin Solthan. Silakan Pak Azikin.

F-P. GERINDRA (Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam Indonesia Raya,

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV,
Yang terhormat Sekjen dan seluruh Eselon I Kementerian Pertanian, Bapak Kabulog yang sempat hadir pada hari ini,

Fraksi Partai Gerindra menyampaikan ringkasan beberapa catatan, tanggapan, masukan, dan pertanyaan sebagai berikut.

Sekjen, indikator keberhasilan Kementerian Pertanian jangan hanya penyerapan anggaran tapi harus ada indikator yang jelas seperti peningkatan produksi, peningkatan jumlah petani, peningkatan kesejahteraan petani, peningkatan pemuda, peningkatan petani yang menggunakan teknologi. Jika anggaran cepat terserap namun tidak ada peningkatan pada kesejahteraan petani, kami minta dalam rapat berikutnya Kementan dapat menerapkan indikator yang kami minta seperti tadi.

Inspektorat Jenderal dalam upaya pemungutan, dalam upaya penguatan pengawasan di lingkup Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal mengupayakan membangun sinergi aparat pengawas intern Pemerintah dan agen pengendali hayati. Untuk mewujudkan ketahanan pangan. Berdasarkan hal tersebut, sinergi dalam bentuk apa yang akan dibangun antara kedua badan, kedua lembaga tersebut dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkualitas di Indonesia? Apakah hanya dengan melakukan pengawalan saja atau ada kontribusi secara langsung dari pembangunan sinergi tersebut?

Dirjen Tanaman Pangan, kami minta Program *Food Estate* untuk dikaji ulang mulai dari kecocokan tanah, agroklimat, infrastruktur, tenaga kerja, dan pemasaran. Jangan sampai modal yang sudah dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil yang kita dapatkan.

Direktorat Jenderal Perkebunan, target peningkatan ekspor perkebunan seperti sawit, karet, tebu, dan sebagainya bukan menjadi alasan untuk pemberian izin alih guna lahan untuk perluasan perkebunan. Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan bagaimana strategi intensifikasi perkebunan yang harus dilakukan oleh Dirjen BUN untuk mencapai target ekspor tersebut.

Jangan sampai hal tersebut hanya di tataran perencanaan tanpa perhitungan kemampuan merealisasikan.

Badan Karantina Pertanian. Dalam bahan Barantan dipaparkan terkait penguatan teknologi informasi guna mendukung program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas, yakni dengan adanya *single* data Badan Karantina Pertanian integritas IQfast dengan sumber data lainnya antara lain Agriculture Wellroom untuk mendukung informasi distribusi lalu lintas pangan. Apakah *single* data ini akan menjadi data tertutup atau terbuka? Siapa saja yang dapat mengakses *single* data tersebut? Mohon penjelasannya.

Dirjen Pertanian, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Perkembangan kasus penyakit mulut dan kuku sebagaimana dilaporkan per 1 September 2022 telah direalisasikan bantuan penggantian ternak sebesar 273 miliar dengan 273 ekor. Untuk Kabupaten Badung 28 ekor, Kabupaten Buleleng 245 ekor dari anggaran subsidi penggantian ternak yang dianggarkan untuk 15.000 ekor senilai total 150 miliar. Fraksi Partai Gerindra meminta laporan secara transparan dan terbuka terkait data realisasi serta disampaikan kepada Komisi IV DPR RI secara berkala. Kami juga meminta penjelasan untuk digunakan apa saja anggaran operasional sebesar 22,5 miliar. Sementara mekanisme penggantian ternak hanya melalui transfer ke rekening pemilik ternak.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian belum terjadi peningkatan anggaran insentif penyuluh dan penumbuhan wirausaha muda pertanian. Kami minta BPPSDM untuk fokus pada peningkatan kesejahteraan penyuluh dan juga masa depan pertanian dengan peningkatan jumlah petani muda.

Dirjen Hortikultura pada bahan rapat program nilai tambah dan daya saing bagian pengelolaan dan pemasaran hasil hortikultura diketahui bahwa dari pagu anggaran 169,78 miliar hanya terealisasi sebesar 60,81 miliar atau hanya sekitar 35,82%. Mengapa penyerapannya hanya sedikit? Padahal, pengolahan dan pemasaran merupakan salah satu elemen penting untuk menjamin keberhasilan satu usahakan.

Terakhir, pada Litbang mohon penjelasan terkait program kerjasama pertanian dengan anggaran 25 miliar. Dirjen Prasarana dan Sarana perluasan perlindungan lahan pertanian serapan anggaran pada tahun 2022 masih sangat rendah. Mohon dijelaskan kenapa serapan anggaran masih rendah padahal jelas ancaman kekurangannya lahan pertanian di Indonesia sangat tinggi, tercatat selama 7 tahun lahan pertanian menyusut 1 juta hektar yang beralih fungsi apakah itu sektor industri atau perumahan.

Demikian masukan dan pertanyaan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Wa'alaikumsalam warahmatullah wabarakatuh

Silakan selanjutnya *young man*, setelah itu Pak Slamet, lalu Pak Dhevych oh iya Pak Sutrisno. Silakan.

F-P. GOLKAR (RAVINDRA AIRLANGGA, M.S.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yang saya hormati Pimpinan beserta rekan-rekan Komisi IV,
Yang saya hormati Pak Sekjen beserta jajaran dan Dirut-dirut Direksi BUMN yang hadir,

Saya ingin menanyakan satu hal saja dari ke Dirjen Tanaman Pangan ada ada anggaran 745 miliar untuk peningkatan produktivitas kedelai dan saya mengapresiasi ini karena melihat lima tahun belakangan produksi tahunan kedelai kita cenderung stagnan di level 500 sampai 600.000. Kemudian dengan anggaran ini saya cuman ingin tahu apa strategi Dirjen Tanaman Pangan untuk meningkatkan produktivitas kedelai dan apakah ini bisa terealisasi?

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Baik. Terima kasih.

Pak Slamet, silakan.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillah terima kasih Bu Ketua, Pak Ketua, rekan-rekan Anggota Komisi IV yang saya hormati,
Yang saya hormati seluruh mitra dari Pak Sekjen, para Eselon I dan juga para direktur yang BUMN yang saya hormati,

Ada beberapa yang ingin saya sampaikan, yang pertama saya masih bicara tentang PMK ini, Bu Ketua. Jadi paling tidak ini yang kemudian harus kita fokus, keseriusan dalam menangani PMK ini karena terkait dengan masa depan peternakan kita khususnya masalah sapi perah, Pak Dirjen. Ini jadi kalau kemarin belum kena PMK data impor susu kita itu juga luar biasa sekitar 80-an, kalau kemudian ini terserang itu *nih* akan jadi masalah besar sementara konsumsi susu kita juga cukup besar.

Nah, saya ingin menggarisbawahi terkait dengan data. Yang pertama terkait dengan program dulu. Mohon nanti ditunjukkan dari program rencana pagu 2023, saya belum melihat, kalau mungkin saya ini tolong ditunjukkan program yang memang berpihak kepada penanganan PMK, itu yang pertama.

Yang kedua, terkait dengan data. Data penggantian ini saya katakan kalau tadi di awal disinggung oleh, Pak Ketua bahwa saya menguatkan bahwa data yang diambil oleh Kementan apa sis apa namanya itu sis Sisdiknas, pokoknya itulah begitu ya artinya data itu tidak valid, Pak. Tolong cara rekrut cara pengambilan datanya diperbaiki. Saya mendapatkan keluhan di petani Pangalengan, itu jumlah sapi yang mati itu 1.468, tapi masuk di data itu hanya ada 20 ekor, Pak, ini di *screenshot* ke saya datanya dan ini menyulitkan peternak di sana untuk kemudian mendapatkan penggantian karena memang beda data. Jadi saya tidak menyalahkan Kementan tetapi cara mengambil datanya harus dipastikan bahwa betul sehingga rakyat kita apalagi terkait dengan susu ya, jadi ini kalau permasalahan susu sebenarnya tidak sekedar kemudian mendapatkan penggantian 10 juta. Mungkin temen-temen yang mempunyai *background* apa kesehatan hewan, saya pikir ini menjadi permasalahan besar, Pak. Kalau kemudian hewan ini sudah terjangkiti ataupun dia sembuh menjadi *suspect*, dia akan berpengaruh kepada reproduksinya, baik dia nanti produksi susunya maupun kemudian pada induk atau keturunannya. Dan saya disampaikan dia hanya bisa memproduksi 2 liter, Pak, sementara untuk menutupi HPP dia itu minimal 11 liter sehingga sebenarnya yang diinginkan adalah penggantian dari induk ini.

Nah, ini saya sehingga di kesempatan ini mengusulkan Pimpinan ada baiknya nanti kita Kunspek salah satunya ke daerah-daerah sapi perah yang memang terjangkit apa terdampak oleh PMK ini, sekaligus juga kita mengkonfirmasi terkait dengan data yang ada di Kementan. Sekali lagi tidak sepenuhnya ada kesalahan dari data yang ada di Kementan tetapi cara merekrut, cara pengambilan data yang kemudian harus disempurnakan sehingga tidak menimbulkan kerugian dari para peternak kita yang kemarin saya sampaikan, seolah-olah ingin memberikan permen tapi permennya ditaruh di atas gunung sehingga ini sulit. Itu yang yang pertama terkait dengan PMK.

Yang kedua, saya masih *concern* lagi terkait dengan *food estate*. Lagi-lagi saya ngomong *food estate*, Pak. Jadi saya tetap berpegang secara formal bahwa lembaga yang sah mengaudit dari seluruh penggunaan uang kita adalah BPK. Sementara masih ditemukan catatan-catatan yang kemudian menyimpulkan bahwa apa *food estate* ini apa tidak akan kemudian bisa mendukung program pangan kita. Tadi disampaikan tidak jelek ya tetapi harus kemudian dilakukan evaluasi.

Nah, terkait dengan itu saya masih melihat juga, mohon dijelaskan kalau ya kalau kemudian oleh BPK sudah dinyatakan bahwa ini ada masalah tapi di Dirjen PSP masih saya temukan anggaran optimalisasi lahan Kabupaten Kapuas. Kemudian optimalisasi lahan Kabupaten Pulang Pisau, optimalisasi lahan Kabupaten Belu, kemudian Hambanghasundutan dan Merauke yang saya pikir ini adalah lokasi-lokasi dari *food estate* dan totalnya 283,5 miliar.

Tolong dijelaskan temuan masih berjalan kemudian sudah dianggarkan lagi, mau diapakan ini ya?

Kemudian juga, ada rekomendasi perlindungan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian, *output*-nya ini rekomendasi perlindungan dan pengendalian. Saya mohon penjelasan dari apa dari *output* dari kegiatan ini karena anggarannya juga cukup besar 38,7 miliar, serta lahan konservasi dan rehabilitasi. Ini catatan terkait dengan masih terkait dengan *food estate* di Dirjen PSP.

Berikutnya, saya juga masih menegaskan lagi sebagaimana yang kemarin Raker dengan Menteri walaupun menterinya enggak hadir. Rekomendasi terhadap Panja mohon dijalankan 100%, tidak separuh-separuh. Saya masih mendapatkan ada dana e-RDCK untuk pendataan penerima pupuk subsidi, itu 52,9 miliar. Kemudian, juga ada layanan verifikasi dan validasi penerima pupuk bersubsidi sekitar 59 miliar. Kenapa e-RDCK ini selalu saya munculkan, selalu saya sampaikan, Pak, karena salah satu rekomendasi dari Panja itu kalau dilaksanakan semuanya e-RDCK ini sudah tidak diperlukan lagi karena nanti pembagian pupuk bersubsidi itu akan berdasarkan luas lahan tanam yang ada di provinsi masing-masing dibagi secara proporsional.

Nah, ini apa beberapa catatan saya terkait dengan anggaran-anggaran yang yang 2022 masih banyak catatan dari BPK tetapi kemudian masih ditemukan penganggaran di 2023.

Demikian mungkin Pak Ketua, Bu Ketua.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam

Pak Sutrisno.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pimpinan, rekan-rekan Anggota, Pak Sekjen, para Eselon I beserta jajaran Direksi BUMN Pangan,

Pak Sekjen, saya langsung saja pada ingin mendalami apa yang pernah disampaikan dalam rapat yang lalu, yaitu tentang RKP dan RKA 2023 yang harus bisa menjawab persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini, yaitu apa namanya yang diakibatkan oleh apa namanya resesi ekonomi global dampak

daripada apa namanya kondisi energi dan pangan kita. Arahan presiden, arahan Presiden pada kita semua bahwa pangan itu harus bisa dipenuhi sendiri, tidak mengandalkan dari impor. Barang-barang yang masih impor tentunya bisa disubstitusikan, itu arahan Presiden, itu daging kemudian bawang putih, keledai dan gula.

Kemudian, tren harga beras sekarang menunjukkan peningkatan, yaitu memberikan sumbangsih ...(suara tidak jelas) 0,02%. Kemudian FAO memprediksikan Indonesia salah satu negara akan kehilangan apa namanya pangan lokalnya. Cabai merah dan bawang merah kemarin disampaikan oleh Pak Sekjen sendiri punya pengaruh yang tinggi dalam mempengaruhi inflasi kita. Oleh karena itu, oleh karena itu, kita tidak bisa menunda-nunda tahun depan bahwa anggaran kita harus bisa menjawab kecukupan pangan kita, harus seperti apa dalam anggaran kita mestinya, mestinya bagaimana menjaga peningkatan produksi pangan, pangan sebagai kebutuhan dasar buat masyarakat untuk melangsungkan hidupnya terutama beras sama jagung.

Persoalan peningkatan pangan ada pada kualitas bibit yang kurang baik. Bibit-bibit yang baik justru adalah dari penangkar lokal sehingga di APBN kita, di Kementerian Pertanian agar tidak memberikan kesempatan bagi penangkar lokal untuk bisa menangkan bibit-bibit kita agar juga rakyat dapat cepat mendapatkan bibit yang baik.

Kemudian Pak Sekjen, sudah waktunya memanfaatkan desa, Bapak, Pak Sekjen ,ya dalam rangka supaya menjaga potensi lokal tidak hilang. Negara kita 91% wilayahnya wilayah pedesaan, 70% rakyatnya ada di pedesaan. Kalau program Kementerian Pertanian diarahkan bagaimana mendukung desa bisa membangun pangan, 70% rakyat kita akan terpenuhi oleh produksinya sendiri, hanya 30%-nya bisa di-*support* dari pada hasil desa-desa yang kelebihan ini. Jadi oleh karena itu, perlu diarahkan ke sana.

Kemudian, Pak Sekjen, di era otonomi daerah urusan pertanian kan sudah didelegasikan kepada pemilik daerah otonom oleh karena itu sudah waktunya dalam rangka mempercepat apa namanya penyediaan pangan agar daerah diperankan untuk melakukan stok pangan. Misalkan gudang desa-desa dibantu oleh kita, daerah sendiri bisa melakukan pengadaan pangan itu. Kalau itu bisa dilakukan pangan kita pasti aman karena semua disentralkan di pusat, distribusi ke daerah daerah-daerah yang berkepulauan ini mungkin akan lamban.

Jadi kemudian, Pak Sekjen, perlu dikembangkan sistem tumpangsari ya. Dengan tumpangsari ini ya ada singkong, ada jagung, ada kedelai dan lain sebagainya sehingga kebutuhan pangan sepanjang waktu, kebutuhan rakyat sepanjang waktu akan terpenuhi.

Kemudian yang kedua, Pak Sekjen, substitusi pangan. Tadi di dalam rencana 2023, untuk daging akan mengembangkan impor apa namanya sapi bakalan dari luar negeri. Saya menyarankan minimal, minimal ya untuk yang aspirasi itu yang tadinya sapi akan lebih baik kalau diberikan domba atau kambing sehingga rakyat yang mendapatkan lebih banyak. Kemudian

percepatan pengembangbiakannya juga lebih banyak, sehingga bisa dirasakan kebutuhan daging bisa dipenuhi oleh program itu. Kalau kita hanya membeli bakalan, kapan akan dimanfaatkan sapi yang bakalan itu. Yang kita perlukan adalah tahun depan harus bisa memproduksi pangan untuk untuk tahun-tahun depan.

Kemudian yang berikutnya itu terkait dengan apa nama swasembada gula. Kementerian Pertanian di Subang mengatakan swasembada gula tahun 2024 tapi di dalam dokumen sekarang 2025. Kemudian BUMN pangan juga mengatakan subsidi apa namanya swasembada gula tahun 2026, PTPN 3 PTPN 8, itu berkomitmen akan swasembada gula tahun 2026. Ini kan masing-masing apa memang bangun membangun pangan sendiri bukankah tanggung jawab itu ada di Kementerian Pertanian, sehingga saran saya adalah yang begini-begini ini agar dikoordinasikan, dikoordinasikan sehingga kami pun juga bisa membantu bagaimana pelaksanaannya karena setiap program yang dikembangkan itu pasti akan berakibat pada keluarnya anggaran itu, ini, Pak Sekjen.

KETUA RAPAT:

Cukup, Pak Sutrisno?

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si):

Ada dua lagi ini, Pak, boleh?

KETUA RAPAT:

Karena kita jam 18.00 WIB, kita sudah harus..

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si):

Pupuk Pak, pupuk Pak.

KETUA RAPAT:

Ya, satu lagi ya.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si):

Ya dengan satu *food estate*. Pupuk, Pak, ada ada tahun 2022 ini ada impor pupuk \$274,7 juta. Pertanyaan saya, pupuk ini untuk korporasi apa untuk rakyat? Kalau untuk rakyat di... di masyarakat di belum beredar ini. Kemudian manakala untuk rakyat berapa kira-kira rakyat bisa membeli pupuk non subsidi ini, ini kan persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat.

Terakhir, Pak, Bu Ketua, terkait *food estate*. Kalau coba kita mencermati *food estate* ini bukan hanya di Sumatera, bukan hanya di Kalimantan, ada di Jawa Tengah, di Temanggung, ada juga di Gresik, tentunya pemikiran Fraksi PDI Perjuangan memang kawasan pangan ini diperlukan agar supaya

kesinambungan kebutuhan pangan bisa terpenuhi. Banyak kebutuhan dari luar tapi ternyata tidak bisa terpenuhi karena akhirnya produksinya tidak berkesinambungan, hanya saja nanti manakala banyak persoalan, itu yang memang perlu dikaji kembali oleh kita oleh karena usul saya, Pak Ketua, supaya rencana bentuk Panja *Food Estate* kiranya bisa direalisasikan.

Terima kasih, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Sutrisno, saya hanya sedikit menjelaskan. Tadi kalau enggak salah denger ini Pak Menteri Pertanian bilang swasembada gula 2024. Tadi ngomong 2025 siapa? Swasembada, 2026 PTPN yang ngomong. Bagaimana PTPN ngomong, orang rendemennya cuma 6. Mesinnya dari zaman Belanda lah itu sudah saya katakan sama ID Food di sini, “kalau *you* tidak bisa rendemen 8, omong kosong mau untung, yang ada buntung”. Mesinnya zaman Belanda *kok, enggak* usah bilang apa. Yang kita ke Jawa Barat, Pak Sutrisno, ingat kan, dari dua pabrik berdekatan satu sudah tutup, yang satu pun bicara. “kami pun rasanya enggak lama lagi tutup” karena apa bahan bakunya *enggak* ada. Ya bagaimana bahan bakunya mau ada, rakyat menanam, rakyat berharap dapat untung. Kalau untungnya menjadi buntung, siapa mau menanam. Mereka pasti mengalihkan ke padi, jagung dan lain-lain.

Kalau saya punya pemikiran 2030 pun bicara swasembada gula rasanya mustahil. Membangun pabrik gula, satu unit pabrik gula *tuh* tanya Pak Buwas *tuh* ya itu minimal biayanya 3 triliun, betul *enggak* Pak Buwas? Paling murah 3 triliun bangunan pabrik gula, duitnya sopo? Bunganya saja kalau pemilik ini punya 30%, dia meminjam kurang lebih 2 triliun hitungnya satu bulan bunganya berapa dari 2 triliun. Anggap satu bulan itu 0,5% berapa bunganya? Jadi jangan jangan enak di mulut tapi kenyataannya tidak realisasi.

Silakan, Dhevy Bijak.

F-P. DEMOKRAT (MUHAMMAD DHEVY BIJAK):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang saya hormati dan tentu saya banggakan,
Kemudian Pak Sekjen, Pak Dirjen dan seluruh jajaran dari Kementan dari beberapa juga Dirut BUMN yang hadir yang saya hormati dan yang saya banggakan,

Izinkan saya mewakili dari Fraksi Partai Demokrat memberikan tanggapan, masukan serta pertanyaan untuk Kementan. Saya mulai dari PSP dulu, Dirjen PSP terkait dengan anggaran program bangunan konservasi air dan antisipasi. Ini yang menjadi pertanyaan kami, yaitu yang meminta penjelasan apakah menjadi, apa pembeda antara program bangunan konservasi air dan antisipasi dengan embung pertanian?

Kemudian yang kedua, ini terkait di daerah, Pak. Pupuk untuk sekarang ini sulit sekali untuk diakses dan kemudian harganya melambung tinggi oleh karena itu, kami dari Fraksi Demokrat....

KETUA RAPAT:

Tolong dijelaskan pupuk subsidi atau non subsidi supaya bisa dijawabnya jelas.

F-P. DEMOKRAT (MUHAMMAD DHEVY BIJAK):

Subsidi, Pak. Subsidi, untuk itu, kami dari Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah untuk mencari solusi terkait dengan permasalahan tersebut agar petani dapat dengan mudah mendapatkan pupuk yang dibutuhkan.

Yang selanjutnya, kami juga dari Fraksi Partai Demokrat meminta tanggapan Dirjen PSP terkait wacana diberlakukannya harga eceran tertinggi pupuk komersil. Kemudian apa saja kendala dan hambatannya?

Kemudian selanjutnya, ini masih di Dirjen PSP, terkait dengan program Unit Pengelola Pupuk Organik (UPPO) harus ditingkatkan mengingat program organik, pupuk organik sangat penting bagi tanah dan terlebih statusnya sudah dikeluarkan dari daftar pupuk yang menjadi pupuk subsidi.

Kemudian selanjutnya, program pemberian bantuan alat dan mesin pertanian tidak bisa disamaratakan karena setiap daerah memiliki karakter karakteristik dan topografi tanah yang berbeda-beda, artinya harus menyesuaikan dengan kebutuhan setiap daerah sehingga akan lebih tepat guna.

Selanjutnya, untuk Dirjen PKH, kami dari Komisi IV DPR RI memberikan dukungan penuh atas penanganan PMK ini, tapi kami juga dari Fraksi Partai Demokrat meminta agar data yang diberikan adalah data yang akurat dan *real* serta tata kelola harus benar karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak.

Kemudian, terkait dengan realisasi serapan anggaran Dirjen PKH tahun 2022 masih di angka 23,29%. Beberapa bantuan ternak juga masih cukup rendah seperti pengembangan ayam yang masih di angka 8,64%, pengembangan kambing atau domba masih di angka 74% *eh* 7,4% dan pengembangan itik di 5%, tolong di Pak Dirjen untuk ditingkatkan lagi agar serapan anggarannya terpenuhi.

Kemudian, selanjutnya untuk Dirjen penanganan Tanaman Pangan terkait dengan target produksi jagung tahun 2023 sebesar 23.000.000 ton sebaiknya ditambahkan sampai.. kalau menurut kami sebaiknya ditambahkan sampai 30.000.000 ton agar terjadi keseimbangan antara kebutuhan pakan ternak dan konsumsi dalam negeri tapi kami juga berharap agar anggarannya juga dinaikkan. Kemudian selanjutnya terkait dengan program bantuan Alsintan

pemipil jagung itu sangat dibutuhkan agar dapat ditingkatkan untuk membantu para petani jagung dalam kegiatan pasca panen.

Selanjutnya, untuk Barantan (Badan Karantina Pertanian). Fungsi utama dari Badan Karantina Pertanian adalah perlindungan dari ancaman HPPK dan OPTK artinya Barantan menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan sumber daya hewan dan tanaman kita. Untuk itu, kami dari Fraksi Partai Demokrat meminta Barantan agar selalu bekerja keras dan melakukan langkah antisipatif atas kemungkinan masuknya segala penyakit ke wilayah NKRI. Kita harus mengambil pelajaran dari jebolnya sistem perlindungan karantina dari wabah PMK.

Kemudian selanjutnya, untuk Dirjen Hortikultura. Ini kita mengikuti amanah dari fraksi, Pak Ketua, izin sebentar lagi, saya persingkat saja ini, Ketua. Selanjutnya, untuk Dirjen Hortikultura, bantuan benih rimpang atau empon-empon agar dapat ditingkatkan tapi jangan lupa disertai juga dengan bantuan alat perajang yang perajang rimpang ya. Kemudian selanjutnya, realisasi *output* pengembangan bawang putih Tahun 2022 seluas 571 hektar atau 33,6% dari target 1.700 hektar. Pada tahun 2023, target penanaman bawang putih seluas 1.700 hektar dengan anggaran 27,2 miliar kami dari Fraksi Demokrat juga meminta pengembangan bawang putih nasional harus terukur dan terencana diiringi dengan pengurangan impor yang jelas.

Selanjutnya, untuk Dirjen Perkebunan, kami dari Fraksi Partai Demokrat meminta agar penentuan harga minimal TBS di setiap daerah tidak disamaratakan karena biaya produksi di setiap daerah berbeda-beda.

Terakhir, Pimpinan, Ketua, itu di BPPSDMP. Terkait dengan kami di Komisi IV DPR RI mengusulkan untuk adanya penambahan BOP untuk penyuluh. Ini bagian dari masukan dan usulan dari teman-teman penyuluh, Pak.

Kemudian terakhir dengan Kementan harus memperhatikan nasib THL yang sudah lama mengabdikan agar diangkat menjadi penyuluh pertanian.

Itu saja Pimpinan dari kami dari Fraksi Partai Demokrat. Mohon maaf kalau ada yang kurang.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam

Tadi maksudnya UPPO ditingkatkan apa? UPPO-nya naik tingkat atau ditambah? Ya, ngomong jangan bilang ditingkatkan. Saya enggak mengerti ditingkatkan itu apa supaya jelas.

Silakan, Pak Salim satu menit.

F-P. GOLKAR (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M):

Terima kasih, Ketua.

Izin saya buat sebuah pantun dulu Ketua, supaya tenang semua Ketua.

*“Rumah tua halaman lebar
Udara dingin makan pala
Jadilah orang yang sabar
Orang yang sabar banyak pahalanya”*

Pak Ketua, Pimpinan yang kami hormati, Pak Sekjen dan teman-teman, Pak Buwas, Pak Holding Pupuk,

Saya langsung saja. Dirjen PKH tadi, saya ini mewakili Fraksi Golkar Ketua yang setia dan taat terhadap pendukung Pemerintah. Realisasi serapan anggaran dari Dirjen PKH, kita berharap pada RDP ini apa yang dikatakan rekan kami dari Demokrat tadi, kita sependapat agar serapan ini, ini sudah Bulan September agar dikencangkan kembali, Ketua.

Yang kedua masalah Alsintan. Saya melihat di 2023 nanti hanya 185 miliar, kalau tidak salah, sementara anggaran di 2022, kalau saya tidak salah itu sampai 500 miliar. Alangkah baiknya, Ketua, karena 2023 ini tahun yang bagus tahun *fengshui*-nya yang mantap untuk kita pikirkan untuk penambahan dalam Alsintan ini.

Selanjutnya masalah dana DAK yang dari awal tadi dalam pengantar, Ketua. Kita heran ini, Pak Ketua, Kementan hanya menerima apa yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas. Porsinya sudah ada dari Bappenas dan Kementerian Keuangan. Saya kira ini perlu ini sistemnya yang kita ubah. Ini, Pak Ketua, tadi menyatakan itu ada dari Banggar, tidak kami pungkiri memang ada program di ketahanan pangan, Ketua, cuman sebagai kawan sebagai sahabat sebagai teman satu Komisi IV alangkah anehnya teman-teman yang katanya anggaran ini dibuat di Kementerian Pertanian, alangkah baiknya rekan-rekan ini pun, ini kan aneh ini Pak Sekjen. Seorang mitra Komisi IV Kementerian Pertanian ada bantuan DAK, teman-teman tidak mengetahui. Saya kira ini pola ke depan bagaimana regulasinya apakah perlu....

KETUA RAPAT:

Justru DAK ini untuk 2023 kan? Bukan akan ke depan, harusnya diubah.

F-P. GOLKAR (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M):

Ya ini kan dalam pengantar Ketua tadi begitu, makanya ini bagaimana sistemnya ini regulasinya itu bisa berubah.

Yang terakhir, Pak Ketua, saya kira Bulog ini adalah sahabat yang terbaik di Komisi IV. Saya berharap, Pak Ketua, melalui forum RDP ini kalau

saudara dan sahabat yang terbaik bagi-bagilah CSR sedikit-sedikit, Ketua, walaupun tidak seperti orang-orang lain saya kira 54 Anggota ini sangat merespon urusan ini. Andaikan di 6 ada 10, di 4 apa salahnya dapat 3, Ketua.

Saya kira, Pak Ketua, awal dengan pantun diakhiri dengan pantun juga supaya kita nih agak *fresh* sedikit, Ketua, menunggu sebelum jam 18.00 WIB.

*Disangka tupai ternyata rubah, Ketua
Rubah besar lebat bulunya.
Mari bersabar dengan indah
Sabar yang tiada halangannya”.*

Terima kasih.

Assalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Sepertinya cocok duduk di sini.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M):

Pak Ketua, saya balas pantunnya, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Mau pantun apa mau ngomong?

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M):

Pantun dulu pantun, balas pantun beliau. Pantun dulu.

KETUA RAPAT:

Ya satu menit.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M):

Ya enggak lama-lama.

*“Burung nuri terbang tinggi
Naik turun di atas dahan
Betapa senangnya hati
Pak Ketua sudah kelihatan”.*

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Edward, yang jelas kalau ngomong jangan bertele-tele.

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Baik.

Selamat sore Pimpinan Komisi IV beserta Anggota Komisi IV yang saya hormati,
Pak Sekjen Kementan beserta Dirjenjnya dan jajaran di bawah Dirjen lagi pokoknya semua yang berada di Kementan,
Bapak Direktur Bulog, Bapak Direktur Pupuk Indonesia, singkatnya hadirin sekalian,

Memang sudah sore tapi kita harus tetap fokus karena ini urusan negara. Kalau urusan rumah tangga masih bisa ditunda, urusan negara ini repot sudah. Jadi saya memberikan apresiasi kepada Kementan memang kerjanya cukup banyak ya tapi harus tetap fokus karena pekerjaan-pekerjaan gini kita dituntut untuk fokus. Saya ulas duluan mulai dari *food estate* saja karena kebetulan *food estate* ini berada di Dapil kami. Jadi permasalahan *food estate* ini sebenarnya sederhana sekali, duit ada, lahan ada, air tidak ada. Jangan kita omong mencong-mencong, kiri-kanan enggak ada guna. Urus ini, air ini, cari air ini, ini kan programnya keliru jadi program Alsintan, program ukur poligon tanah segala macam tapi airnya dia tidak ukur, dia tidak cari. *Kan* sama saja satu tahun itu musim hujannya tiga bulan. Jadi kesalahannya ada di ketersediaan air. Biar kita bicara pupuk juga kalau untuk *food estate* peningkatan pangan ini, kalau faktor air salah satu pendukung ini kalau tidak ada percuma itu biar bawa insinyur dari Amerika, Uni Soviet, juga tidak akan berhasil. Jadi coba nanti kita bicarakan mengenai air. Kita lintas komisi atau lintas kementerian karena mereka harus tahu bahwa untuk mendukung program Presiden ini, mereka harus memberikan dukungan kalau tidak kan susah. Duitnya ada ratusan miliar. Coba dibuat bendungan, airnya ada, sungainya ada, lahannya ada yang bisa dibuat bendungan. Kalau tidak *kan* sayang kita di Komisi IV, Kementerian Pertanian ini akan dianggap gagal dan BPK akan terus memberikan temuan, dianggap belum berhasil.

Jadi coba kita bicarakan dulu mengenai *food estate* ini programnya bagus artinya untuk meningkatkan ketahanan pangan, cuma pelaksanaannya tidak... maksudnya tidak arahnya *mencong* ini. Jadi air sekarang kita ngomong air dulu untuk *food estate*. Kalau air sudah ada yang lain-lain akan berjalan dengan baik. Alsintan yang sudah dikirimkan cukup banyak sana tapi kalau percuma mau buat apa Alsintan. Kalau ketersediaan air tidak ada hanya ... Jadi itu saja kalau mengenai *food estate*. Kita melakukan, apa koreksi dulu apanya yang salah di situ tapi saya yakin kalau air ada, pasti akan targetnya akan tercapai. Pupuk ada, itu Pupuk Indonesia siap produksi pupuk banyak, duit ada ratusan miliar apanya yang itu. Jadi baik itu mengenai *food estate* artinya kenapa dia ditaruh di NTT, itu kita harus tanya kenapa dia karena NTT ini daerah termiskin habis lagi tertinggal. Orang di sini sudah pakai traktor, kita masih balik pakai linggis kebanyakan, ada yang traktor ya kecuali ada bantuan tapi kebanyakan masih linggis, itu yang orang bilang tertinggal itu, habis itu dia menjurus kepada termiskin. Sudah termiskin dia menjurus lagi dia akan merambat lagi ke busung lapar atau kurang gizi. Mau makan apa kalau pertaniannya tidak berkembang secara modern. Jadi tuh ada ada urutannya.

Oke mungkin kita bahas *food estate* banyak mana yang sudah bahas cuma saya sedikit memberikan masukan.

Yang kedua, mengenai PSP. PSP, PSP ini saya lihat targetnya sudah bagus dan cuma alat-alat ini, Pak Wandu, alat-alat ini coba dipercepat supaya ini kan

KETUA RAPAT:

Pak Wandu itu bukan PSP, Tanaman Pangan (TP).

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Oh iya *sorry*, minta maaf, Pak Wandu. Yang saya maksud itu PSP sebut salah nama, Pak Jamil. Jadi ini ini banyak permasalahan akhirnya bingung sendiri ini. Jadi baik, Pak Jamil, mengenai PSP ini memang peralatannya sudah oke cuma kita minta kalau bisa dipercepat karena ini sudah masuk musim tanam 3 sekarang ini, sementara alat-alat Alsintan pertanian belum...belum apa maksimal turun baru 40% ya, Pak Jamil. Jadi, kami memberikan masukan agar kontrak-kontraknya bisa, memang dalam menjalankan kontrak ada kendala. Ada yang CPCL-nya belum masuk, ya kami memaklumi juga itu tapi bagi yang kalau kalau bisa yang CPCL-nya sudah masuk tolong didahulukan karena di daerah kami itu sangat membutuhkan Alsintan.

Yang satu lagi PKH, PKH ini memang pernah saya bicarakan bahwa NTT ini termasuk daerah yang belum masih zona hijau yang belum terjangkau oleh virus mulut eh penyakit mulut dan kuku. Bagaimana cara kita mempertahankan itu, kita *enggak* bisa berserah pada alam. Kita harus memberikan vaksin pencegahannya. Jangan sampai sudah terjangkau virus, baru kita mau kasih vaksin *kan* tidak ada guna lagi. Itu bilang mau coba tes ELISA test apalagi, ELISA sama Covid punya itu apa ya itu sudah. Percuma.

Jadi sekarang kita mengantisipasi, memang Pak Nasrullah karena begini kita harus menjaga populasi daripada ternak ini. Kalau manusia bilang makan *enggak* mati, ya kita tidak tahu ya nanti kalau terjadi mutasi gen tiba-tiba mati, siapa yang bertanggung jawab. Lebih baik hal yang ada kita basmi dan mengenai vaksin yang ada, *kan* anggaran sudah dikucurkan *toh*, Pak, sudah turun sekitar hampir 4 triliun ya. Saya pikir kita gencarkan saja, kita jalankan saja sesuai rencana awal, jadi jangan sampai di tengah jalan, kita berpindah pemikirannya kan fatal nanti. Virus ini orang *enggak* bisa menduga, sewaktu-waktu dia bisa berkembangbiak dan mutasi gen seperti Covid saja. Bermacam-macam jenis dia bermutasi terus. Jadi kalau memang di Sumba eh Sumatera Selatan dia penanganannya secepat itu dalam waktu satu bulan atau tiga minggu itu bisa menghilangkan virus itu, kita mengharapkan agar dana yang sudah dikeluarkan segera diberikan kepada daerah-daerah yang masih hijau, yang belum terjangkau, harus dikasih antisipasi. Kita lahir saja virus kolera *entah* apa itu kita langsung dikasih cacarnya sudah waktu umur berapa 4, 5 tahun sudah dikasih, kita *enggak* tunggu-tunggu terjangkau dulu baru kita obati. Ini *kan* sudah masif ini terhadap penyakit mulut dan kuku, ini sudah masif.

Jadi saya kira, ya kita jangan berpatokan *bilang*, nanti *kan* Pak Nasrullah bilang ternyata kita masih impor juga daging dari Brazil, dari India, ya ini yang membawa *carrier*-nya ke Indonesia ini. Jadi kita *kan* penelitiannya belum maksimallah, kita belum tahu pasti pembawa *carrier* tapi saya yakin pasti dari India atau dari ada yang bilang Thailand ada yang bilang Brasil. Sebaiknya kita waspada *kan* lab-nya sudah ada 30 lab yang melakukan PCR sama ELISA test di Indonesia 30 lab. Ini saya kira tolong dari Dirjen PKH betul-betul menjalankan ini karena kalau kita hanya dengan kata-kata saja enggak bisa ini....

KETUA RAPAT::

Terus intinya apa dia ngomong apa waktu di Sumatera Selatan mengenai virus PMK?

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Ya, jadi untuk virus PMK itu, intinya kalau *enggak* divaksin juga *enggak* apa-apa.

KETUA RAPAT:

Oh, Dirjen ngomong begitu?

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Ya, jadi biarlah secara alamiah, jadi kita *kan* bilang, “*Oh kalau begitu kita enggak usah vaksin lagi biarkan saja karena tidak berbahaya bagi manusia*”. Intinya begitu, jadi kita hanya menangani bukan hewannya yang kita jaga tapi manusianya yang tidak berbahaya untuk makan hewan yang terjangkit oleh virus mulut dan kuku.

KETUA RAPAT:

Cukup Pak Edward ya. Coba dijelaskan kata-kata tadi, “*enggak usah di vaksin pun enggak apa-apa*”, coba jelaskan. Kalau Anda mengatakan tidak usah divaksin, kita batalkan anggarannya dalam RDP hari ini, itu saja karena yang melaporkan sama saya bukan hanya Pak Edward, Anggota yang berkunjung ke Sumatera Selatan mengatakan Anda bicara seperti itu.

Silakan.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Izin, Pak Ketua.

Jadi yang saya sampaikan adalah untuk wilayah yang belum ada kasus karena dalam status PMK itu status tertinggi, sebelum negara bebas PMK statusnya adalah wilayah atau zona bebas tanpa vaksinasi. Ini nanti ke depan untuk deklarasi OIA, kita lebih cepat jika misalnya seperti NTT. Tidak ada

kasus, jangan divaksin, kalau divaksin satu ekor pun maka NTT masuk seperti dengan wilayah lain adalah wilayah yang bebas PMK dengan vaksinasi. Kita harapkan tanpa vaksinasi begitu penjelasannya, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Anda waktu bicara di mana NTT, Bali, Sumsel?

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Di Sumsel juga, saya bicara seperti itu.

KETUA RAPAT:

Saya tanyakan Anda waktu bicara dengan kunjungan spesifik ke Sumsel, *kan?*

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Sumsel, Pak.

KETUA RAPAT:

Ya, di sana ada yang kena PMK, *enggak?*

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Ada, Pak.

KETUA RAPAT:

Kenapa ngomong *enggak* usah vaksin, kalau *enggak* usah vaksin, kita alokasikan dana yang 3,8T. Jadi jangan banyak kata-katalah, jangan banyak retorika. Saya paling *enggak* suka. Wilayah walaupun itu wilayah tersebut ada satu ekor pun yang kena PMK, apa salahnya kalau dana dari Pemerintah sudah disiapkan, sudah dikucurkan, sudah disetujui oleh Komisi IV, kenapa *enggak* cepat eksekusi? Menunggu, menunggu lagi nego lagi dari Rp38.000,00 jadi Rp22.000,00 apa Rp20.000,00 begitu maksudnya?

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Bukan Pak. Ini contohnya tadi NTT, Pak. Tidak ada kasus satu pun.

KETUA RAPAT:

Saya tanya Anda ini bicara di Sumsel apa di NTT. Waktu itu *kan* kunjungan spesifik Anda ke Sumsel, ada Ibu Maria betul? Ikut *kan*, ada Pak Edward yang lain melaporkan ke saya. Kalau begitu *enggak* usah beli vaksin, *ngapain* Pemerintah membuang duit 3,8 triliun. Maka, kami itu sepakat membuat Panja untuk tahu alur pemasukkan PMK dari mana. Jadi Anda jangan bolak-balik, bolak-balik *enggak* usah lah itu. Jujur saya ini agak kecewa dengan kinerja Anda ini ya, sangat jelek sekali dan saya juga sudah laporkan ke BPK harga Rp38.000,00, itu saja sudah.

Silakan dijawab, Ibu Maria mau ngomong? Silakan.

F-PDIP (MARIA LESTARI, S.Pd.):

Baik, Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan beserta Anggota Komisi IV,
Yang hormati Eselon, Bapak Sekjen Pertanian Republik Indonesia beserta
ukuran Eselon I bersama rombongan BUMN,

Izin bertanya pada Dirjen PMK, Dirjen PKH. *Nah*, ini kita melihat dari data yang diberikan dalam perkembangan PMK berjenis ternak nasional per tanggal 1 September ya pukul 24.00 WIB, di sini kita melihat masih ada vaksin babi. Padahal, kemarin kita tanyakan ini vaksin babi ini seperti apa ya *kan*. *Nah*, karena beberapa bulan yang lalu ada terjadi penyakit ASF. *Nah*, di sini kami meminta kepada Dirjen PKH untuk meminta vaksin tetapi tidak ada. *Nah*, ini kenapa ada vaksin untuk babi ya? *Nah*, ini kurang lebih 16.148 ekor yang divaksin. Saya mau tahu ini datanya dari mana ya *kan*, ini sumber data laporan dari apa ini Hanas Crisis Center PMK Nasional. *Nah*, itu tolong data yang diberikan ini buku yang pertama sama yang kedua yang difotokopi ini sama. Jadi apa yang mau kita ini buka katanya tadi ini datanya baru tapi ini masih sama saja ini datanya, itu yang pertama.

Nah, saya melihat program perkebunan, di sini pagu anggaran tahun 2022 dalam pengembangan kawasan tanaman tahunan dan penyegar di tahun 2022 di sini ada 321, *nah*, turun dengan pagu 2023 pengembangan kawasan tanaman tahunan dan penyegar. Yang ingin saya tanyakan ini pengembangan kawasan tanaman tahunan ini seperti apa, Pak? Karena saya baca di sini *kan* bukannya hampir sama itu pengembangan kawasan tanaman penyegar dan rempah, ini tolong dijelaskan juga.

Terus untuk menu DAK fisik dan non fisik 2023 dalam Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Saya mencermati pertanian regeneratif itu seperti apa, Pak, tolong dijelaskan juga.

Terima kasih.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, Mbak Kiki, satu menit.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Ya.

Pak Dirjen saya ingin bertanya terkait PMK tadi, mungkin yang dimaksud oleh Ibu Maria Pak Dirjen, Pak Sekjen dan beserta jajaran, satu saja ingin saya tanyakan. Apakah penularan PMK ini melalui *airborne* atau tidak? Jadi saya sebagai pemangku Dapil, Pimpinan, dari Sumatera Selatan kalau dibilang zero case ada pemindahan agenda dari BPPU ke karantina dikarenakan katanya penularan itu *via airborne*. Jadi diantisipasi untuk tidak ke sana katanya demikian. Saya tidak tahu informasinya dari mana karena awalnya kami mengajak ke BPPU Sumbawa.

Nah, karena jenis apa, selama ini kita tidak pernah mengulik jenis apa ini, Pimpinan, untuk virus PMK yang ada karena ini perlu diobservasi karena katanya selama itu yang saya dapat informasi, selama itu memang berkuku dan berkuku 2 dan lain-lain itu bisa tertular. *Nah*, jadi saya mohon penjelasan Pak Dirjen ya, apakah betul informasi yang kami dapat? Jadi saya butuh kejelasan mengenai apakah betul ini virus jenis yang bisa menyebar melalui *airborne*, jadi ini saja.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan dijawab semua pertanyaan Anggota.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Terima kasih, Bapak Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Pertama, tentu kami sampaikan terima kasih banyak sekali arahan, masukan dan koreksi dari Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI tapi ada beberapa yang berkait dengan pertanyaan, mohon nanti seluruh Dirjen teknis yang terkait menjawab.

Yang pertama, dari Pak Azikin kaitanya dengan apa indikator capaian Pak Azikin. Tadi tidak hanya realisasi anggaran tapi juga kita menggunakan indikator yang sudah biasa kita lakukan....

KETUA RAPAT:

Saran saya kalau orangnya *enggak* ada, *enggak* usah dijawab tapi semua nanti pertanyaan Anggota dibuat tertulis juga.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Baik, terima kasih.

Kami persilakan dari Dirjen Tanaman Pangan, ada beberapa.

DIRJEN TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Pak Ravindra *enggak* ada, yang kedua tentang jagung Pak Dhevy juga *enggak* ada, izin tertulis nanti kami lengkapi, terima kasih. Ada di situ tadi.

Terima kasih. Terima kasih kami jawab ada, Pak, ternyata Pak Dhevy.

Izin, jadi terima kasih untuk jagung 2023, 23.000.000 ton dan itu target mudah-mudahan minimal karena berbagai langkah kita lakukan seperti saat ini animo masyarakat tanam jagung juga bagus agak menguntungkan sehingga apa yang dimaksud Pak Dhevy bisa tercapai. Detailnya tertulis nanti, terima kasih, Pak.

Untuk Pak Ravindra tentang strategi produktivitas nanti terkait tadi ada empat strategi yaitu menyiapkan benih unggul sejak sekarang, kemudian pola monokultur tumpangsari dan berikutnya.

Terima kasih.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Izin Pak. Dirjen Hortikultura.

DIRJEN HORTIKULTURA KEMENTERIAN PERTANIAN:

Terima kasih.

Ada dua dari Pak Sutrisno terkait dengan penangkar benih lokal, Pak, ya. Jadi memang dalam produksi benih tahun 2022 maupun 2023 ini, kita sudah melibatkan penangkar-penangkar, Pak, untuk penangkar buah-buahan, Pak. Jadi kami sudah melibatkan, 2023 juga akan kami perbanyak lagi dengan penangkar-penangkar lokal, Pak Sutrisno.

Terus yang kedua pertanyaan dari Pak Dhevy terkait dengan bantuan benih rimpang maupun alat perajang, juga kami siapkan nanti tahun 2023 dan juga untuk bawang putih terus kami akan kembangkan untuk pengembangannya. Nanti jawaban tertulis juga kami akan sampaikan.

Terima kasih.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Izin Pak Ketua.

Dilanjut Dirjen Perkebunan.

DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Terima kasih, Pak Sekjen.

Yang pertama, dari Pak Azikin nanti mungkin secara tertulis terkait dengan strategi intensifikasi yang akan kita laksanakan yang mana rata-rata produksi komoditas perkebunan kita, itu belum mencapai 50% sehingga pilihannya adalah intensifikasi sehingga produktivitas optimalnya bisa tercapai daripada realistis yang ada saat ini.

Dari Pak Sutrisno, mungkin nanti akan kami jelaskan lebih detail terkait dengan... kalau yang kami swasembada gula konsumsi, Pak. Kalau yang di BTP itu adalah swasembada gula industri.

Mungkin selanjutnya Pak Dhevy Bijak, terkait dengan penentuan harga TBS. Minggu yang lalu kami dengan seluruh asosiasi dan mitra swasta sudah melaksanakan uji publik terkait dengan revisi Permentan 03 Tahun 2018 yang banyak dipermasalahkan oleh daerah terkait dengan pedoman pembelian TBS kelapa sawit. Mudah-mudahan dalam 1, 2 bulan ke depan, kita sudah bisa menghasilkan hasil revisi Permentan 03 Tahun 2018.

Selanjutnya dari Bu Maria, kalau yang pengembangan kawasan itu intensifikasi, Bu. Jadi ada selain dapat benih juga dapat saprodi, sedangkan yang pengembangan yang satunya itu hanya mendapatkan benih mungkin itu, Bu, yang bisa saya jelaskan.

Terima kasih.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Terima kasih.

Izin, Pak Ketua. Pak Dirjen Peternakan.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Terima kasih, Pak Sekjen.

Izin Pak Ketua, Pimpinan dan seluruh Anggota.

Yang pertama, Pak Slamet untuk yang sapi perah yang tercatat di kami itu 1.535, Pak. Jadi angka yang Pak Slamet sebut tadi yang kita temukan, Pak, beberapa angka yang masuk ke dalam Sisdiknas dan tercatat 1.535.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Khusus Pangalengan, Pak.

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN
PERTANIAN:**

Pangalengan sendiri 952 ya, Pak, Bandung, Kabupaten Bandung 1.700.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Ya, ini saya dapat dari koperasi, Pak. Dia sulit melakukan klaimnya itu karena memang data yang ada di koperasi dengan data yang dari Dinas tidak sinkron, banyak yang tidak masuk. Data yang di *screenshoot kan* ke saya kematian seribu sekian ekor, yang ada di data itu hanya 20. Ini kita *enggak* ingin berdebat di sini baiknya nanti kita harus uji lapangan dua-duanya PKH datang, kita datang, Pak Ketua. Jadi supaya ini segera terselesaikan masalah rakyat kita yang ya, kalau beliau pegangannya data tidak terlalu salah juga karena memang punyanya itu tetapi harus kita konfirmasi di lapangan. Jadi kepentingan saya menyampaikan di sini bukan jawaban itu tetapi ayo kita konfirmasi di lapangan sebenarnya sesungguhnya yang terjadi seperti apa, begitu, Pimpinan.

Terima kasih.

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN
PERTANIAN:**

Baik Pak.

Yang kedua, Bu Kiki, jadi salah satu penyebaran satu adalah *airborne* salah satu, yang lain adalah dibawa oleh manusia kendaraan yang mungkin sempat kontak atau berdekatan dengan wilayah yang ada virus PMK.

Demikian.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Boleh izin Pimpinan? Oke.

Salah satu, Pak. Tadi saya garis bawah, itu berarti kalau boleh tahu menurut hasilnya Dirjen PKH beserta jajaran sampai ke bawah ini ada berapa jenis yang dari salah satu yang tadi ini. Salah satu *airborne*, jadi saya mencoba menggarisbawahi itu, salah satunya *airborne* jadi ada berapa varian yang hadir hari ini.

Izin Pak.

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN
PERTANIAN:**

Varian virusnya maksudnya?

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Iya karena kan tadi, Bapak *statement* salah satu kan.

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN
PERTANIAN:**

Penyebarannya, Bu, penyebarannya melalui *airborne* salah satunya, yang kedua dibawa oleh manusia bisa, dibawa oleh kendaraan bisa dan perpindahan ternak.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Izin Pimpinan, masih boleh? Berarti yang *existing* yang mayoritas di Jawa Timur lah yang paling banyak itu, itu penyebarannya melalui?

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN
PERTANIAN:**

Perpindahan ternak antar wilayah di awal-awal.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Pak Ketua, terkait ini, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Pantun lagi?

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Eenggak, tadi sudah pantun.

Terima kasih, Pak Ketua.

Di Sumatera Barat itu sekarang ada pembatasan di mana masyarakat itu tidak boleh melakukan pemindahan.

KETUA RAPAT:

Pembatasan lalu lintas.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M):

Ya, pembatasan lalu lintas.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Hewan ternak?

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M):

Hewan ternak.

Nah, sehingga ini berimplikasi kepada Pemprov itu mengeluarkan surat di mana program-program yang dari pusat ini, itu tidak boleh diadakan pengadaan disitu baik yang di dalam provinsi, antar kabupaten maupun juga di luar provinsi, di luar kabupaten, di luar provinsi itu untuk diadakan pengadaan ternak baik sapi, kambing atau ayam. *Nah*, ini bisa menghambat program kita dari pusat, Pak Ketua.

Saya minta ini melalui pemerintahan ini bisa setidaknya-tidaknya pengadaan itu antara hijau dengan hijau itu boleh.

Demikian, Pak Ketua.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Pimpinan, satu lagi.

INTERUPSI F-PKS (drh. H. SLAMET):

Interupsi.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, Kiki dulu, baru Pak Slamet.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Oke.

Pak, saya tadi mungkin satu saja terakhir saya tanya. Jenis virus apa karena *kan* yang saya tahu virus ini harus *equal* dengan vaksin yang dipakai. Jadi saya boleh di *mentioned* jenis virus apa hari ini yang PMK yang mayoritas dihadapi oleh ternak hari ini?

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pak Slamet sekalian.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Jadi saya ingin mendapatkan gambaran gini saja, Pak, bagaimana langkah-langkah Dirjen PKH dalam ini juga Kementan dalam rangka kemudian kembali menuju Indonesia bebas PMK. Saya tadi bingung, begitu ya, secara teori betul, saya, yang disampaikan oleh Dirjen cuma permasalahannya bagaimana kemudian kita bisa menjadi, Pak, yang tinggal beberapa provinsi di Indonesia tidak akan ada virus yang masuk walaupun tidak divaksin.

Saya mohon penjelasan bagaimana langkah-langkah antisipasi yang dilakukan oleh Kementan tinggal beberapa provinsi sehingga memberi apa memberanikan jaminan untuk tidak adanya virus masuk di situ sehingga berani mengatakan bahwa itu tidak perlu dilakukan vaksinasi, sementara ya tadi penularannya diakui di luar memang lewat *airborne disease*, lewat udara ada juga melalui pergerakan manusia, sementara kita kan juga tidak terbatas seperti itu. Itu mungkin perlu dijelaskan Pak. Jadi Indonesia dulu bebas PMK tanpa vaksinasi dan tidak ada virus. Sekarang kita sudah masuk, paling tidak saya ingin mendapatkan gambaran langkah-langkah kalau tidak bisa lisan tolong dijelaskan sampai kepada kembali Indonesia seperti awal bebas PMK tanpa vaksinasi. Jadi saya memang belum bisa menerima tadi, Pak, kalau secara teori bisa begitu ya. Dengan dimasukkan vaksin di situ, memang pada hakekatnya mengirim itu cuma masalahnya kita satu, satu kesatuan NKRI bagaimana kita bisa melakukan memberikan jaminan bahwa tidak ada virus yang kemudian tersebar di wilayah yang masih hijau.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan dijawab.

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN
PERTANIAN:**

Yang pertama Bu Kiki jadi serotype itu O.

Kemudian Pak Slamet untuk itu memang....

KETUA RAPAT:

Virusnya O atau vaksinnya yang O?

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN
PERTANIAN:**

Serotype virusnya O Manisa namanya, Pak.

KETUA RAPAT:

Nah terus? Jadi Kalau Anda beli yang Rp38.000,00 apa vaksinnya?

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN
PERTANIAN:**

O, Pak.

KETUA RAPAT:

O apa OA? jawab.

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN
PERTANIAN:**

OA. Ada unsur O-nya di dalam situ. Dan hasil *surveillance* kita efektivitasnya baik terhadap apa namanya kekebalan atau efektivitas dari vaksin tersebut dari sampel 10 ekor.

KETUA RAPAT:

Dulu belinya OA, sekarang belinya apa?

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN
PERTANIAN:**

Ada yang O, ada yang OA, Pak. Ada yang mono ada yang B-Valen

KETUA RAPAT:

Saya tanya, waktu Anda masukin obat pertama kali, ada enggak Anda konsultasi sama ASOHI?

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN
PERTANIAN:**

Ada, Pak.

KETUA RAPAT:

Anda tidak ada konsultasi sama ASOHI karena sebelum Anda beli, saya panggil ASOHI ke sini. Saya karena saya bodoh, saya panggil. Apakah Asohi memberikan rekomendasi? Sampai sekarang belum. Anda cuman konsultasi sama Persatuan Dokter Hewan Indonesia, jadi tolong yang jujur jawabnya

sama saya. Ya, yang jujur lah, ya. Orang Anda enggak melibatkan ASOHI *kok*, saya kan memanggil ASOHI. Persatuan Dokter Hewan Indonesia mau ketemu, saya *enggak* mau ketemu. Direktur Kesehatan Hewan tahu kenapa sebabnya. Jawab ya nanti jujur.

Ya, jawaban Pak Slamet saja, itu Pak Slamet tanya, jawab.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Ya, jadi Pak Slamet jadi dalam bentuk negara kita adalah kepulauan jadi ini satu juga keuntungan karena ada *barrier* laut. Kita berupaya semaksimal mungkin, kita memang tidak bisa jamin bahwa yang daerah hijau bakal tidak kena karena kan kita tidak tahu pergerakan. Namun demikian, kita berusaha untuk mempertahankan dengan berbagai pengetatan lalu lintas yang ada dengan melibatkan beberapa unsur-unsur yang terkait di dalam pembatasan transportasi lalu lintas ini.

Nah, akhirnya nanti pada kalau sudah kita melakukan vaksinasi, kita harapkan bahwa wilayah tersebut bisa bebas dengan vaksinasi sebagai *starting* dari status. Kemudian mudah-mudahan dalam tidak terlalu lama, kita bisa naik ke status negara bebas tanpa vaksinasi dan akhirnya sampai kepada negara bebas PMK dan saat ini....

KETUA RAPAT:

Tadi Pak Slamet menyatakan, kira-kira berapa ratus tahun maksudnya Pak Slamet begitu sampai bebas PMK lagi?

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Kami belum punya perkiraan, Pak Ketua, tentang tahunnya tapi kita berupaya semaksimal mungkin, paling tidak kita saat ini sudah bisa menurunkan dulu apa namanya kasus harian yang ada sambil lambat laun kita akan mempertahankan wilayah itu sebagai daerah bebas dengan vaksinasi. Sementara vaksinasi terus kita kuatkan pada hewan-hewan yang sehat, termasuk yang pernah kena dan sudah mengalami kesembuhan seperti itu.

Demikian, Pak Ketua.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Mau ngomong?

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Iya.

KETUA RAPAT:

Boleh, silakan.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Pak Nasrullah, yang pertama mohon maaf dulu.

Yang kedua, saya simpulkan identifikasi akar persoalannya itu tidak clear maka solusinya juga pasti akan meleset jauh. Contoh, ada dua kata kunci pakai Bahasa Inggris, bagus banget. Kementerian Pertanian sekarang lagi menyiapkan *exit strategy* menuju *zero case*. *Exit strategy*-nya ini apa, *zero case* itu dalam bayangan kami itu bebas PMK tetapi dari penjelasan Kementerian Pertanian, *zero case* itu bukan bebas PMK karena lembaga internasional PBB tidak mengatakan bahwa Indonesia bebas PMK dan targetnya kalau Pak Slamet tanya tadi berapa ratus tahun, sebenarnya Kementan itu jawab tuh akhir 2022 awal 2023. Sementara virus

KETUA RAPAT:

Ada jawabannya itu?

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Loh, rapat kemarin saya catat ini *loh*, saya catat. Sementara saya

KETUA RAPAT:

Ya, kalau begitu ya kalau di kalau 2022 akhir bebas PMK, babi yang 3T itu dialihkan saja.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Begini, jadi ini ini jalan pikirannya

KETUA RAPAT:

Untuk beli ternak lagi....

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Pak Ketua, jalan pikirannya ini adalah dengan dana tiga koma sekian itu, Kementan lagi melakukan menyiapkan *exit strategy* menuju pada *zero case* pada awal Januari 2023, tinggal empat bulan atau tiga bulan. Sementara studi UGM mengatakan ini virus RNI yang bisa bermutasi. Jangan lagi lah saya jelaskan, bahaya.

KETUA RAPAT:

Harus dijelaskan kalau Anda tahu supaya semua publik tahu.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Loh, ini super bahaya, Pak.

KETUA RAPAT:

Eggak apa-apa supaya supaya tadi yang agak agak abu-abu itu lebih jelas lagi atau Anda cuman ngomong doang tapi *enggak* tahu. Ayo jelaskan kalau tahu.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Ini super bahaya Pak, ya jadi bukan cuma *airborne disease*

KETUA RAPAT:

Mencari penyelesaiannya kalau itu super bahaya.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Tetapi juga. Iya, ini ini kategorinya yang bisa bermutasi, Pak, itulah mengapa tadi dibilang *zero case*, Pak. Mohon maaf hanya tinggal 3, 4 bulan apa iya, jangan sampai 3,5T ini hasilnya akan nihil, Pak. Makanya saya bilang ini permainan kata. *Exit strategy* menuju *zero case*. Coba kasih tahu *zero case*, definisi *zero case* ini apa menurut Kementan. Kementan nanti akan jawab, "kasusnya *enggak* ada tapi virusnya masih ada" itu jawabannya. Saya catat Bos, makanya tadi saya *enggak* mau tanya dulu, biar saja Ibu Kiki sama Pak Slamet tanya. Jadi, mohon maaf *nih* Pak Nasrullah *enggak* masuk di nalar kami ini dan 3,5T ini saya berani menyimpulkan *enggak* akan ada hasil.

Pertanyaan sederhana dari Pak Sudin tadi, Pak Ketua, vaksinnya apa jenisnya. Bapak *enggak firm*, kalau *firm* Pak, spontan itu jawabannya akan benar Pak, makanya saya mulai dengan kesimpulan identifikasi akar masalahnya salah, solusinya juga akan salah. Jadi terus terang, Pak Sudin, apa yang mau kita omong. Mohon maaf, saya dari tadi *tuh* aduh, *zero case* coba apa. Apakah tidak akan ada PMK? jawabannya adalah PMK masih ada eh *sorry*, kasusnya tidak ada tapi virusnya masih ada, itu bagaimana itu.

Kalau tidak ada lagi PMK berarti virusnya juga tidak ada dan itu ada pernyataan resmi dari lembaga internasional PBB. *Zero case* coba. Jadi, mohon maaf ya, kita jangan dimanipulasi dengan terminologi-terminologi bahasa asing yang sebenarnya secara substantif itu dari segi penalaran sangat rapuh. Mohon maaf sekali, Pak, kami menghormati Bapak-bapak sekalian tetapi aduh, ya begitulah.

Saya tambahkan lagi. Beberapa waktu lalu dibilang bahwa belum ada vaksin untuk babi, lebih susah mencari vaksin untuk babi. Di sini tadi Ibu Maria tanya sudah ada vaksin untuk babi ini, saya senang sekali ini. Ini kapan nih vaksin untuk babi karena kemarin baru uji coba serum. Pak, mungkin saya yang salah tolong diluruskan, Pak. Apakah vaksin untuk babi ASF itu berbeda dengan vaksin yang ini?

KETUA RAPAT:

Cukup ya Pak Ansi ya sudah jam 18.00 WIB.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Ya.

KETUA RAPAT:

Sudah Bang stop dulu Bang. Kalau untuk

F-P. (.....):

Izin, Pimpinan. Ini kan sudah Jam 18.00 WIB, boleh *enggak* kita lanjut kesimpulan supaya rapat ini *enggak* tertunda lagi?

KETUA RAPAT:

Ya, Anggota ya, jadi daripada nanti kita skors balik lagi 19.30 WIB ya kan atau yang mau salat silakan salat, ya kan sambil kita hanya membaca kesimpulan rapat. Saya hanya minta persetujuan itu.

Pak Khalid?

F-P. GERINDRA (Ir. H.T.A. KHALID, M.M.):

Setuju, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya, terima kasih.

F-P. GERINDRA (Ir. H.T.A. KHALID, M.M.):

Cuma minta Sumatera Barat itu kasusnya.

F-P.... (.....) :

Saya? Baik.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh,

Pimpinan, Pak Sekjen beserta seluruh jajaran,

Izin, saya hanya mengingatkan saja tentang permasalahan pasca keluarnya kanun Aceh itu yang menyangkut dengan Lembaga Keuangan Syariah di Aceh karena di Aceh kan tidak ada lagi bank konvensional. Jadi terjadi permasalahan kita di asuransi karena di Aceh ini kan harus Asuransi Syariah jadi petani kita selama ini tidak terasuransi ini jadi *problem*, Pak. Maka permasalahan ini setelah beberapa kali kita advokasi sehingga pada kesempatan ini saya meminta kepada Kementerian Pertanian agar memperhatikan ini karena di Aceh sekarang *enggak* ada asuransi petani karena di sana tidak ada belum jelas asuransi karena kita di sana harus ada keuangan syariah.

Jadi, kemarin juga Pak Gubernur telah mengirim surat, kebetulan itu dikirim oleh Pak Gubernur, PLT Gubernur Aceh kepada Menteri Pertanian itu tanggal 15 Agustus yang tembusannya turut disampaikan kepada kita, Komisi IV. Maka pada rapat hari ini, saya ingin mengingatkan agar Pak Menteri merubah saja Permen 40 itu tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Kalau Permen itu tidak diubah, itu tidak bisa kita laksanakan asuransi apapun terhadap pertanian di Aceh karena pertanian di Aceh itu harus syariah. Ini mohon perhatian serius karena selama ini petani kami tidak terlindungi itu. Tolong segera dilakukan perubahan Permen 40 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian.

Terima kasih. Itu saja, Pak Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Pimpinan. Satu lagi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, satu menit, Ki.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Saya mau ke bahannya ini Dirjen PSP. Di belakang lembar terima kasih, Pak Jamil, itu di poin B ada kata, saya ingin memastikan saja jangan sampai multitafsir. Ada kata optimasi lahan, optimasi lahan, optimasi lahan. Kalau saya melihat lokus ya ini berarti di lokus kawasan sentra produksi pangan atau *food estate*. Apakah betul atau tidak? Saya ingin memastikan itu karena yang saya pahami dari Komisi IV sendiri sudah memberi lampu kuning ya bahwa kalau ini belum *clear* masalah ini jangan dulu dijalankan.

Terima kasih, Pimpinan.

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Izin, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya, satu menit Mas karena ini waktunya sudah mepet.

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Setengah menit juga *enggak* apa-apa, Pak.

Saya ke Pak Dirjen PSP saja, Pak, mungkin saya pengen penjelasan nantinya terkait dengan *food estate*. *Food estate* itu tadi, Pak Ketua, tadi pagi tanya ada yang satu hektar ada yang 5 ton ada yang 4 setengah ada yang 2, Pak. Jadi harapan saya, Pak, kita bisa diberikan data lokasi *food estate* itu semua terkait juga cocoknya untuk tanaman apa sih, Pak, sebenarnya karena kita bicara *food estate* kan bicara pangan. Kalau *enggak* cocok ya jangan dipaksakan, mungkin cocoknya bukan padi dikasih padi, cocoknya tanaman yang lain dikasih tentu akan berbeda dan kenapa *sih* kalau satu lokasi itu paling 4 ton, 5 ton, ada yang 2 ton, tentu kami perlu penjelasan dan saya yakin bahwa baik sarana prasarana ataupun dari kemampuan masyarakat sekitar juga petani kalau mereka tidak pernah bertani padi, suruh padi ya pusing mungkin, Pak, kalau dia biasa kebun.

Nah, tentu saya pengen data yang lengkap terkait titik-titik tanah yang ada yang dipakai untuk *food estate* ini, Pak. Jadi, kita biar jelas, Pak, tidak ada, bukan berarti bahwa saya yakin *food estate* itu juga tidak bisa selesai setahun pasti juga ada tahapan perencanaan. Perencanaan seperti apa *sih* Pak apakah setahun, dua tahun, tiga tahun seperti ini gambarannya. Setahun target kita seperti ini, tahun berikutnya seperti ini, tahun ketiga kita *goal*-nya, Pak.

Harapan saya, itu kira-kira, Pak Ketua, hanya itu saja mungkin yang kami sampaikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Sunarna, kita

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si):

Pimpinan, pupuk belum dijawab, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Jawab saja, pupuk siapa yang jawab?

DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Izin, Pak Ketua, Bapak/Ibu semua, Pak Sekjen.

Saya respons beberapa, Pak, nanti lainnya kami buat tertulis, Bapak. Yang pertama terkait dengan tadi mengenai Alsintan, terus kemudian ini percepatan Alsintan ya, kami setuju, Pak, mudah-mudahan bisa segera kita selesaikan. Yang kedua, spesifikasi Alsintan di seluruh lokasi, kami mohon dibantu informasinya kira-kira speknya seperti apa, jadi kita bisa menyesuaikan, Pak, supaya tidak diratakan itu.

Yang kemudian terkait dengan pupuk. Pupuk tentu kita setelah ada Permentan 10 kita Bapak/Ibu semua, kita sudah menggunakan yang namanya tentu pola alokasi berdasarkan alokasi Bapak/Ibu semua. Jadi usulannya itu tidak lagi seperti yang dulu di Permentan 41, jadi Kepmentan, nanti Permentan ada, Kepmentan untuk alokasi itu ke provinsi kabupaten jadi dari pusat ke provinsi maupun kabupaten berdasarkan pagu yang ada berdasarkan anggaran yang ada.

Nah, tentu atas dasar itu nanti kabupaten menetapkan penerima itu berdasarkan yang tadi itu e-RDCK itu Bapak/Ibu semua. *Nah*, kami mau berusaha untuk merubah istilah e-RDCK Bapak/Ibu semua sesungguhnya tapi di Bappenas belum bisa dirubah masih istilah itu. Jadi, kami sebenarnya lebih tepatnya itu e-Alokasi. Jadi, nanti yang terima itu, itu sudah berdasarkan alokasi yang ada di daerahnya masing-masing. Jadi, tidak lagi mengusulkan terhadap apapun yang seperti biasa atau yang lalu itu dilakukan, Pak.

Nah, terus kemudian untuk...

KETUA RAPAT:

Tadi Pak Sutrisno belum dijawab, belum selesai.

DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Ya, Pak. Oh kalau impor berarti ke, Pak, izin Bapak, mungkin ke Pak Dirut PI, Pak, kalau itu nanti izin.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Izin Ketua. Sedikit.

KETUA RAPAT:

Sebentar tunggu, Pak, jawab dulu, Pak, supaya selesai.

DIRUT PUPUK INDONESIA:

Yang terhormat Pak Ketua, Bapak Pimpinan Komisi IV dan seluruh Anggota Komisi IV yang kami cintai, dan Pak Sekjen dan Pak Dirjen dan rekan-rekan Dirut BUMN,

Baiklah, untuk tadi pertanyaan Pak Sutrisno adalah terkait impor ya, Pak, ya. Jadi, sebenarnya tidak ada impor pupuk yang dilakukan khusus dari

Pupuk Indonesia, Pak, ya. *Nah*, kalau seandainya ada impor di dalam data impor itu biasanya adalah pupuk yang digunakan untuk bahan baku, Pak. Jadi ada *direct application* misalnya untuk kebun itu ada *rock fosfat* untuk *direct application*, kemudian KCL itu biasanya dilakukan oleh kebun yang tentunya data itu terangkum di dalam data impor.

Demikian, Pak.

Terima kasih.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Terima kasih, Pimpinan.

Karena e-RDKK tadi itu pertanyaan saya, Pak. Jadi, Pak Dirjen justru kami tidak ingin terjebak di istilah. Jadi mau diubah kayak apa saja kalau esensinya e-RDKK, ya sama saja.

KETUA RAPAT:

Ganti judul.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Betul. Jadi justru kita ingin proses e-RDKK yang kemudian kemarin-kemarin menghasilkan ketidaktepatan sasaran dan mengeluarkan biaya yang miliaran tadi sampai kalau dijumlah hampir 150-an tahun kemarin, itu bisa teralokasikan secara tepat. Jadi, mohon dicatat Pak, kami, tidak bicara tentang masalah bajunya apa tapi esensinya kan sama-sama saja, mau e-Lokasi mau e-RDKK. *Nah*, nanti tinggal dijelaskan saja perbedaan di luar ini karena sudah sore, Pak. Perbedaan antara e-Lokasi dan e-RDKK itu apa. Jadi, kami secara esensi memberatkan kalau kemudian prosesnya sama dengan E-RDKK lagi.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Pak Sutrisno, mungkin tadi pertanyaannya ada impor pupuk ya, bukan bahan baku *toh?* berarti ada enggak impor pupuk dari luar negeri? Ada, tapi itu atas referensi dari Kementan Sekjen karena kan ada Balitbang ada penelitian apakah pupuk ini bisa izin edar di Indonesia, betul?

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Betul, Pak.

KETUA RAPAT:

Jadi itu tidak ada urusan sama bahan baku. Pupuk itu diimpor umumnya dari, dari Cina itu ada ke Indonesia tapi harus melalui Litbang dan lain-lain. Jadi ada, bukannya enggak ada, itu ya.

Dari dialog diskusi dan saran maka akan kami bacakan kesimpulan rapat dengar pendapat pada hari ini.

Kami persilakan, Pak Pimpinan.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Izin, Pak Ketua.

Sumatera Barat belum dijawab.

KETUA RAPAT:

Ya, jawab dulu.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Izin Pak Ketua.

Jadi untuk Sumatera Barat sudah ada Pak surat edaran yang terbaru dari Satgas PMK, jadi dari wilayah hijau ke hijau, hijau kemerahan saya akan kasih ke Bapak untuk di menjadi dasar untuk melaksanakan koordinasi dengan dinasnya, Pak.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Terima kasih, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Enggak baca pantun lagi, *enggak*? Karena mau baca kesimpulan ini kalau *enggak* baca pantun.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Pak Ketua *sorry*. Bisa *enggak* Pak Nasrullah jawab yang saya tanyakan itu soal vaksin babi, singkat saja dan yang kedua soal *exit strategy* dan *zero case*, singkat saja karena ini mendasar.

KETUA RAPAT:

Ayo jawab.

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN
PERTANIAN:**

Izin, Pak Pimpinan dan Anggota.

Vaksin yang dimaksud di sini adalah vaksin PMK untuk babi, Pak. Jadi yang habis karena dia juga termasuk hewan yang rentan terhadap PMK. Yang kedua, jadi *zero case* yang dimaksud adalah tidak ada lagi penambahan kasus di wilayah tersebut sebagai langkah awal kita untuk menuju *exit strategy* yang ada, bukan berarti belum ada, jadi ada. *Zero case* itu tidak ada di laporan kasus penambahan kasus yang ada itu yang dimaksud dengan *zero case* dalam pelaporan, makanya kan di sini ada *zero case reported* sebenarnya yang tidak dilaporkan lagi ada kasus di situ. Namun, secara deklarasi nantinya kita mengikuti prosedur yang ada di dalam OIA.

Demikian, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Yang ditanyakan itu oleh dia ini bukan masalah babi kena PMK tapi babi yang kena virus flu Afrika (ASF). Apakah sudah ada vaksinnnya? Itu yang ditanyakan bukannya babinya kena PMK. Saya saja menyimak di sini.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Tunggu dulu, jawab dulu.

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN
PERTANIAN:**

Kalau vaksin ASF belum ada, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Berarti vaksin ASF belum ada, belum ditemukan, jadi belum beli, jelas.
Ya Kiki.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Terima kasih.

Pak Dirjen, saya enggak tahu ya prinsipnya begini saja, kalau saya lihat berarti kerja, Bapak, itu semakin berat, Pak, karena kan ternyata bisa menular ke babi, kambing ya maaf ya, Pak.

KETUA RAPAT:

Rusa.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Ya.

KETUA RAPAT:

Oh iya, rusa, iya loh.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Saya mengingatkan ya, saya mengingatkan supaya ini berarti jadinya kalau tidak ada *roadmap* yang *clear*, klasterisasi yang *clear* dari Dirjen PKH dan jenis vaksin dosis vaksin dan lain-lain ini, ini berarti nanti ya mohon maaf ya....

KETUA RAPAT:

Ya, seperti Delta lah, gitu.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Ya begitu lah, Pak.

Terima kasih Pimpinan.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Izin, Pimpinan sedikit.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Jadi, saya kepancing ngomong lagi ini jadi agak-agak geli juga begitu ya. Mohon maaf, Pak, kita belum selesai menyelesaikan tadi yang sudah terjangkit di kita sapi, tahu-tahu juga mau menyediakan vaksin PMK dari babi. Saya ingin data *sih* apakah sudah ada babi yang terserang, yang sudah ada dulu *deh selesain*, begitu. Jadi secara teori ya potensi betul, Pak, jadi babi itu iya tapi datanya belum ada sudah disiapin vaksinnya sementara ini ternak kita yang sudah teriak-teriak itu belum selesai. Mohon ada..gitu lah Pak, izin membuat *roadmap* untuk sampai Indonesia bebas PMK seperti apa, tolong disampaikan kepada kami. Kami mungkin ingin mengawasi sebagai hak konstitusional kami sekaligus juga memberi masukan.

Demikian, Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi jangankan untuk babi, untuk kambing sama domba saja masih belum jelas ya. Sudah cukup? Kalau cukup, silakan Pimpinan membacakan kesimpulan rapat RDP hari ini.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Pimpinan sebentar Pimpinan, belum dijawab tadi, Pak Jamil.

KETUA RAPAT:

Apa itu?

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Itu nomenklatur itu.

DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Izin Pak, boleh saya.

KETUA RAPAT:

Ya.

DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Iya, yang izin Bu Kiki yang optimasi itu, Bu, itu adalah yang sudah diinikan dari Bappenas. Jadi ini optimasi istilahnya ini, boleh di intensifikasi Ibu. Jadi di *food estate* itu di Kalteng terutamanya itu kan ada intensifikasi dan ekstensifikasi. Jadi itu Bappenas mengarahkan, tidak lagi kita ada kegiatan ekstensifikasi, tidak juga lagi ada kegiatan itu di lapangan untuk 2023 tapi diarahkan untuk meningkatkan produktivitas yang di ekstensifikasi di 2021 itu dan juga di tempat lain. Jadi, boleh dia di dalam, boleh di luar, Bu Kiki, seperti itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya tanya, yang bagian irigasi Anda siapa direktornya?

DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Ada, Pak Rahmanto, Pak, izin.

KETUA RAPAT:

Pernah ketemu *enggak*? pernah ke lapangan *enggak* pertanyaannya. Pernah *enggak* tahu *enggak* manusianya yang mana?

DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Kami boleh tugaskan, Pak, ke mana nanti, Pak, saya pikir kalau ya

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Bukan tugaskan, *enggak* ada gunanya. Itu kan kewajiban dia untuk mengontrol seluruh wilayah Indonesia. Jangan ada penugasan, ini jangan dibalik-balik *dong*. *Oh*, tugas saya sebagai mengecek irigasi ya jalan ke lapangan. *Oh*, di sini bermasalah sini masalah kalau hanya tunggu penugasan *enggak* perlu ditugaskan, *berhentiin* saja ya.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Pimpinan, terakhir.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Ya, berarti, Pak Jamil menyimpulkan dari omongan Bapak supaya tidak multitafsir tadi ya, berarti ini betul adalah *food estate* di dalam sini, optimasi lahan ya.

DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Izin.

Di *food estate* kita, kegiatannya itu khususnya yang di Kalteng ya, Bu, ya khususnya yang di Kalteng, itu kan ada intensifikasi dan ekstensifikasi. Jadi untuk 2023 tidak lagi ada istilah *food estate* itu di kita lagi di PSP. *Nah*, untuk meningkatkan produktivitas di areal intensifikasi maupun yang di ekstensifikasi itulah kegiatan ini yang dimaksud dari Bappenas, Bu.

Terima kasih, Bu.

KETUA RAPAT:

Cukup, ya?

F-PDIP (MARIA LESTARI, S.Pd.):

Pak Ketua, Pak Ketua, izin.

KETUA RAPAT:

Apalagi?

F-PDIP (MARIA LESTARI, S.Pd.):

Ini yang masalah vaksin babi tadi belum dijelaskan ini.

KETUA RAPAT:

Sudah dijawab, tidak ada.

F-PDIP (MARIA LESTARI, S.Pd.):

Tidak ada, tapi di sini ada vaksin, Pak, vaksin PMK kan, *nah*, itu untuk pencegahan atau yang sudah kena, *nah* itu.

KETUA RAPAT:

Kalau vaksin itu untuk pencegahan, kalau yang sudah kena sudah sehat, baru boleh divaksin. Ada lagi?

F-PDIP (MARIA LESTARI, S.Pd.):

Pertanyaan yang belum dijawab oleh Badan Penyuluh Pengembangan SDM Pertanian, pertanian regeneratif itu seperti apa, Bapak?

KETUA RAPAT:

Jawab.

F-PDIP (MARIA LESTARI, S.Pd.):

Anggaran lumayan besar ini.

KA. BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN (BADAN PPSDMP) KEMENTERIAN PERTANIAN:

Mohon izin, Pak Ketua.

Bu Maria, jadi pertanian regeneratif itu adalah pertanian berkelanjutan, secara singkatnya begitu.

KETUA RAPAT:

Berkelanjutan maksudnya apa, *nih? Enggak*, supaya jelas. Saya kadang-kadang istilah-istilah berkelanjutan nih kelanjutannya *nyemplung* ke laut atau ke mana?

**KA. BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
(BADAN PPSDMP) KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Jadi apa maksudnya adalah semua fungsi lingkungan tanah, air, udara atau lahan ya terhadap peningkatan produktivitas pertanian, itu berlanjut terus.

KETUA RAPAT:

Yang itu *mah enggak* perlu Anda jelaskan, kita semua tahu, kalau *enggak* mati kita, *enggak* makan gimana.

**KA. BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
(BADAN PPSDMP) KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Ya, maksudnya begitu, Pak Ketua. Jadi, pertanian regeneratif gitu mudahnya pertanian berkelanjutan. *Nah*, lebih spesifik lagi di dalamnya ada restorasi lahan, ada konservasi lahan, ada antisipatif terhadap perubahan iklim, oke. Konkritnya itu antara lain pertanian organik ya, kemudian juga ada di sini mengenai *smart irrigation* misalnya rumah kaca dan lain sebagainya, begitu.

KETUA RAPAT:

Tadi apa *smart*, *smart* apa?

**KA. BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
(BADAN PPSDMP) KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Farming.

KETUA RAPAT:

Smart farming, sudah ada? Duitnya ada?

**KA. BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
(BADAN PPSDMP) KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Ya, ini yang diusulkan di dalam DAK, Pak.

KETUA RAPAT:

Bos, Anda mengurus penyuluh saja belum benar ya, BOP saja *kagak* cukup Rp300.000,00 jangan bicara *smart farming* itu terlalu tinggi ya. Kita ngomong wajar-wajar saja yang landai-landai saja lah, *enggak* usah bilang *smart* ini... ini... ini BOP Rp300.000,00.

Saya *kan* pernah kemarin waktu Raker sama Pak Kasi, saya katakan, kenapa *sih* paling tidak untuk saya jelaskan lagi untuk para penyuluh mengirimkan laporan secara periodik, apa salahnya ditambahkan pulsa misalnya Rp50.000,00 apa Rp100.000,00 per penyuluh per bulan. Sekarang bagaimana penyuluh mau buat laporan, "*wah* pulsa saya, *entek iki*, *sesok wae*

lah, sesok, wah belum tuku. Wassalam, Pak, sudahlah sampai kapanpun akan seperti itu ya. Pikirkan omongan saya itu, jangan didiemin saja, ya.

Pak Dirut Bulog, ada yang mau disampaikan? PTPN? *Enggak* ada lagi. Ya, Pimpinan bacakan, tolong jangan ada yang interupsi. Sudah matiin *handphone*-nya. Siapa? Mau ngomong lagi Maria? Mau ngomong lagi? Sudah bacakan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

Baik, saya bacakan kesimpulan atau keputusan rapat RDP hari ini.

Yang pertama,

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai realisasi anggaran Kementerian Pertanian tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp18.476.753.423.000,00. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meningkatkan realisasi kegiatan dan program tahun 2022.

Anggota?
Pemerintah?

(RAPAT:SETUJU)

2. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas pagu anggaran Kementerian Pertanian dalam RKA tahun 2023 sebesar Rp15.422.181.379.000,00 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S.617/MK.02/2022 dan Nomor B-577/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2022 tanggal 27 Juli 2022, hal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023.

Anggota?

INTERUPSI F-PKS (drh. H. SLAMET):

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Terkait dengan kesimpulan Nomor 2, masih ada perbaikan *enggak* Pak? Karena di situ “menerima penjelasan”, sebenarnya saya *enggak* menerima Pak dengan program-program seperti ini *food estate* muncul lagi dengan naik apa dengan nomenklatur yang berbeda. Tadi e-RDCK dengan nomenklatur yang berbeda. Esensinya sebenarnya kami itu khususnya saya, *enggak* tahu

Anggota yang lain, tidak menerima tentang *food estate* juga ini walaupun istilahnya adalah optimalisasi lahan.

Maka konsekuensi dari “menerima penjelasan” adalah kita menerima ini semuanya, Pak, kecuali di situ “menerima penjelasan dan minta perubahan” sesuai dengan saran oleh, eh dari rapat RDP hari ini, itu mungkin kami masih bisa terima, itu, Pak Pimpinan. Ya, jadi ada konsekuensi dan menerima penjelasan itu, ini berarti kita terima sementara tadi catatan dari seluruh Anggota banyak, bagaimana menyiasati itu? usul saya “menerima penjelasan dan dilakukan perubahan.”

KETUA RAPAT:

Paham Pak Slamet, kalau begitu kita ubah.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Oke, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia “mendengar penjelasan” bukan menerima, hanya mendengar, ya kan. Raker yang akan datang setelah diubah baru kita terima. Beda *loh* antara “menerima” dengan “mendengar”. Kita hanya mendengarkan saja ya.

Setuju?

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Setuju, Pak.

(RAPAT:SETUJU)

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

3. Komisi IV DPR RI...

Nah, ini “menerima” lagi penjelasan ini, Pak Slamet. Menerima, mendengarkan karena ini kan ya. Saya ulangi.

3. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan mengenai Pagu Indikatif Dana Alokasi Khusus... mendengarkan mengenai pagu indikatif, oke mendengarkan penjelasan. Saya ulangi.

3. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan mengenai Pagu Indikatif Dana Alokasi Khusus Kementerian Pertanian Tahun 2023 sebesar Rp2.600.091.000.000,00 dengan rincian:

a. DAK Fisik sebesar Rp2.300.046.000.000,00 yaitu:

1) DAK tematik “Pengembangan *Food Estate*” sebesar Rp650.000.000.000,00.

- 2) DAK tematik “Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan” sebesar Rp1.650.046.000.000,00.
- b. DAK non Fisik sebesar Rp300.045.000.000,00.

Anggota?
Pemerintah?

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Setuju, Pak.

(RAPAT:SETUJU)

KETUA RAPAT:

Saya jelaskan ya, kalau masing-masing Anggota ingin mengajukan DAK itu, ya ingin mengajukan DAK itu, biasanya bulan Februari ya. Jadi misalnya, 2024 itu diusulkannya dari 2023 Februari atau Maret paling lambat ke Kementerian Pertanian karena ini kan prosesnya panjang ke Bappenas ke Keuangan dan lain-lain. Ini supaya jangan salah. Kalau tadi saya bilang bisa *enggak* saya ubah hari ini? *Enggak* bisa karena sudah menjadi pagu ya.

Ya, lanjut.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

Keempat,

4. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk mengkaji ulang terhadap program dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan *food estate* sesuai potensi, daya dukung, daya tampung, sumber daya, sosial ekonomi dan tata ruang wilayah. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta agar hasil kajian diserahkan selambat-lambatnya 10 hari setelah RDP hari ini.

Anggota?
Pemerintah?

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Izin.

Ini fokus ke yang reguler APBN atau DAK, Pak? Izin.

KETUA RAPAT:

Dua-duanya *dong*.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Dua-duanya.

KETUA RAPAT:

DAK kan uang, kan APBN, paham? Setuju?

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Setuju Pak.

(RAPAT:SETUJU)

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan mitigasi dan antisipasi ancaman krisis pangan melalui perancangan rencana kerja dan anggaran tahun 2023 secara terukur dan berorientasi pada peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.

Anggota?
Pemerintah?

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Setuju, Pak.

(RAPAT:SETUJU)

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menindaklanjuti semua tanggapan dan masukan dari Anggota Komisi IV DPR RI agar disampaikan secara tertulis menjadi bahan pembahasan pada rapat kerja berikutnya.

KETUA RAPAT:

“Sebelum rapat kerja”.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

Sudah, sebelum. Sebelum.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Izin, Pak.

“Agar disampaikan secara tertulis sebelum rapat kerja berikutnya”.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

Untuk menjadi pembahasan. Saya ulang.

6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menindaklanjuti semua tanggapan dan masukan dari Anggota Komisi IV DPR RI agar disampaikan secara tertulis sebelum rapat kerja untuk menjadi bahan pembahasan rapat kerja berikutnya.

Anggota?

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Setuju, Pak.

(RAPAT:SETUJU)

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian mengoptimalkan aset Balai Pengkajian Teknologi Pertanian dengan melakukan produksi dan perbanyakan benih maupun bibit tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan untuk dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal teknis terkait.

Anggota?

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Setuju Pak.

(RAPAT:SETUJU)

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Pimpinan.

Ini baru muncul. Saya mau meminta kalau ini terkait PMK, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian menyampaikan data secara rinci mengenai, data secara rinci dan peta jalan, minta *roadmap*-nya, Pimpinan sekalian.

Perkembangan pelaksanaan vaksin. "Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyampaikan data rencana kerja serta peta jalan mengenai perkembangan pelaksanaan vaksin PMK".

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Izin.

Vaksinasi, Pak.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

Sudah? Baik.

8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyampaikan data rencana kerja serta peta jalan pelaksanaan vaksinasi PMK yang disampaikan secara berkala kepada Komisi IV DPR RI setiap bulannya.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Izin Pak.

Jika diperkenankan karena ini, ini data atau rencana kerja, gitu?

KETUA RAPAT:

Dua-duanya.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Nah, kalau itu soalnya menyambung kok Pak.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

Data dan rencana kerja.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Nah, data dan rencana kerja begitu.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

Data, koma.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Data dan rencana kerja serta peta jalan oke.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

Saya ulang.

8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyampaikan data, rencana kerja, serta peta jalan pelaksanaan vaksinasi PMK yang disampaikan secara berkala kepada Komisi IV DPR RI setiap bulannya.

Anggota?

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Pimpinan, izin.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Pimpinan. Ya Kakak Ansi dulu ya, tambah saja sedikit.

Jadi ikut jalan pikirannya Kementerian Pertanian. “Data, rencana kerja, serta peta jalan pelaksanaan vaksinasi PMK menuju *zero case* pada awal 2023”. Iya tambah itu, “h”-nya dihapus. “*zero case* pada awal 2023”. Kalau 2023 saja itu bisa Desember 2023.

KETUA RAPAT:

Boleh *enggak* kalau “pemetaan peta jalan” diganti “pemetaan pelaksanaan”? Pemetaan pelaksanaan. Jadi sudah dipetakan baru dilaksanakan.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Pak Ketua, kita ini ikut terminologi dan jalan pikiran Kementan. Dua kata kuncinya itu *exit strategy* menuju *zero case*.

KETUA RAPAT:

Itu akan ditambahkan nanti Bos di bawahnya, kan tadi kan peta jalan saya ubah jadi pemetaan pelaksanaannya, baru di bawahnya tadi yang Anda masukan itu akan dimasukkan.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Oke-oke, siap-siap.

KETUA RAPAT:

Sabar dulu, kalau laper makan dulu situ.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Pimpinan. Kalau mau, kalau itu tidak pakai pemetaan pelaksanaan, Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

Pak Sekjen, ada ini coba.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Izin Pak.

Jika ada penekanan tadi, mohon izin, untuk menyampaikan data rencana kerja dan pelaksanaan vaksinasi. *Kan* sudah ada rencana pelaksanaan begitu mungkin. Pemetaannya termasuk di dalam sebelum, sebelum pelaksanaan pasti ada pemetaannya itu, Pak, izin.

F-P. (.....) :

Pak Ketua, mungkin pemetaan lokasi, Pak.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Izin, Pak.

“Komisi IV DPR RI meminta Kementerian untuk menyampaikan data, rencana kerja, serta pelaksanaan vaksinasi PMK”, begitu ya, izin. Jadi di situ sudah termasuk ada pemetaannya, Pak, sebelum dilaksanakan.

KETUA RAPAT:

Anggota setuju?
Pemerintah?

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Setuju.

(RAPAT:SETUJU)

KETUA RAPAT:

Saya ada satu yang masih menjadi kendala saya, perihal 2021 keputusan Komisi IV dilaksanakan oleh Eselon I perihal kerjasama antara Eselon I dengan BPTP, tapi 2022 *kok* tidak dilaksanakan. Ini apa maksudnya Pak Sekjen? Jawab.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Izin, Pak Ketua.

Di dalam perencanaan tapi tadi sudah Dirjen Tanaman Pangan misalnya masih melaksanakan itu, Pak, produksi benih oleh BPTP

KETUA RAPAT:

Yang lain, yang lain?

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Ya, Dirjen Hortikultura konfirmasi masih ada ya? Dirjen Perkebunan? Tujuh BPTP, Pak.

KETUA RAPAT:

Yang 2022?

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Iya, ini 2022, Bapak.

KETUA RAPAT:

PKH?

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN
PERTANIAN:**

PKH belum ada, Pak, karena kita masih menggunakan UPT yang ada dan perlu infrastruktur masuk ke dalam lahan BPTP jika ingin membuat pusat pembibitan.

KETUA RAPAT:

Maksudnya *veteriner* Anda itu yang kosong melompong itu di Lampung?

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN
PERTANIAN:**

BTPU, Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya, ada apa itu di sana isinya?

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN
PERTANIAN:**

Isi BTPU itu untuk apa namanya..

KETUA RAPAT:

Enggak, saya tanya ada apa isinya, ada sapi, apa kambing apa kucing apa monyet di sana, Pak?

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN
PERTANIAN:**

Di mana Pak? Lampung BPPT tidak ada, Pak, ternak, yang ada di Balai Pembibitan Ternak Unggul.

KETUA RAPAT:

Anda kan punya balai di sana kan? Apa balai apa apa sebutnya?

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN
PERTANIAN:**

Ya, Balai Veteriner Lampung, Pak.

KETUA RAPAT:

Apa kerjanya?

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN
PERTANIAN:**

Itu kaitan dengan pengendalian dan surveilans pengendalian penyakit,
Pak.

KETUA RAPAT:

Kalau *enggak* ada penyakitnya?

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN
PERTANIAN:**

Tetap dilakukan surveilans, Pak.

KETUA RAPAT:

Kenapa *enggak* diberdayakan untuk pengembangan? Kalau Anda tadi bilang BPTP oke *enggak*, Anda kembangkan saja di situ.

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN
PERTANIAN:**

Baik, Pak.

KETUA RAPAT:

Bisa *enggak* 2022?

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Ketua, sini Ketua.

KETUA RAPAT:

Tunggu dulu, Pak Suhardi, saya belum selesai.

Bisa enggak 2022? Misalnya masukkan bibit dari Bali 20, dari yang di Jawa Timur 20, dikembangkan di sana daripada mereka enggak ada kerjaan, kan cukup gede lahannya. Itu Pemerintah punya *loh*, Anda punya *loh* bukan saya punya *loh*.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Butuh infrastruktur, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya karena apa, sekian puluh tahun menganggur tidak diberdayakan, bangunannya rusak, jawab saja begitu ya betul kan? Iya. Ya bangunan *enggak* dipakai, ya terbengkalai. Saya minta 2023 harus ada kegiatan di setiap BPTP maupun di PKH.

Pak Suhardi Duka, satu menit sebelum saya menutup.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

BPTP Sumbar sama sekali *enggak* ada kegiatan 2022.

KETUA RAPAT:

Jawab.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Saya juga yakin bahwa semua BPTP di Indonesia tidak punya kegiatan. Tadi mengatakan bahwa ada 7 BPTP, coba kita lihat laporannya secara jelas.

KETUA RAPAT:

Ya, nanti dibuat laporan.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Ya kenapa, karena menganggap bahwa status BPTP memang tidak jelas. Oke Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Jadi begini BPTP ini sekarang sudah tidak di Litbang, cuma pegawainya ada, gajinya ada, kantornya ada, kegiatannya tidak ada, kan begitu. Daripada ini menganggur nanti terbengkalai sekian puluh tahun, kenapa *enggak* dikerjasamakan dengan Eselon I terkait. Misalnya pengadaan bibit padi, jagung, kedelai ataupun yang lain-lain begitu kan, Bapak setuju kan? *Nah*.

PEMERINTAH:

Izin, Pak Ketua, bisa satu menit?

KETUA RAPAT:

Mau ngomong?

PEMERINTAH:

Jadi saya meluruskan, Pak Ketua. Jadi BPTP masih di Litbang Pak Ketua. Orangnya yang pindah, penelitiannya sebagian yang pindah.

KETUA RAPAT:

Tapi Litbangnya kan sudah *kagak* ada, Bos.

PEMERINTAH:

Siap, tapi BPTP-nya masih.

KETUA RAPAT:

Iya, kan tadi saya katakan BPTP-nya Litbangnya kan sudah enggak ada.

PEMERINTAH:

Siap, Pak Ketua menunggu Perpres yang baru.

KETUA RAPAT:

Maka daripada sayang terbelengkalai, di BPTP itu banyak orang-orang pintar ya suruh buat penelitian begitu *loh* kan ini kan satu badan bukan beda badan, ya.

Sebelum kami menutup rapat dengar pendapat ini, kami persilakan Saudara Sekjen untuk menyampaikan kata penutup dalam RDP hari ini.

Silakan.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Terima kasih, Pak Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh,

Pimpinan dan Anggota yang kami muliakan,
Bapak/Ibu sekalian para hadirin rapat dengar pendapat yang kami hormati,

Kami menyampaikan terima kasih atas seluruh masukan, arahan, kritikan dan juga beberapa pertanyaan yang tentu akan kami jawab melalui tertulis tadi seperti dirumuskan sebelum Raker kami akan sampaikan.

Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan.
Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Teman-teman Anggota,

Ini ada sekedar masukkan bahwa masih banyak CPCL yang belum diterima oleh Eselon I ya. Kenapa penyerapannya terlambat antara lain seperti itu. Jadi, mereka masih menunggu 2 sampai 3 hari. Apabila belum diterima CPCL-nya, nanti akan dibahas dipindahkan alokasinya ke program yang lain. Tadinya ada wacana dari Kementerian, CPCL-nya mereka mengurus, betul? Meminta kepada daerah-daerah, saya menolak. Itu adalah aspirasi dari Anggota untuk dibawa langsung ke masyarakat. Jadi waktunya 2 sampai 3 hari ya.

Terima kasih.

Dengan demikian berakhir sudah rapat dengar pendapat hari ini. Atas nama Pimpinan, Anggota Komisi IV mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ini ada kekurangan kekhilafan.

Dengan mengucapkan *alhamdulillahirobbilalamin*, rapat dengar pendapat ini kami tutup. Saya akhiri.

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

(RAPAT DITUTUP PUKUL 18.40 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

Drs. ACHMAD AGUS THOMY
NIP. 196508171988031002